

2025



# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KAPANEWON PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ponjong, 31 Januari 2026



**WASIH TRIWAHYUNI, S.STP, M.Si**  
NIP. 19800115 199810 2 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan 1 "Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas":

Tujuan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul yang pertama diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026. Dengan target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026 sebesar 92,00 dan capaian di tahun 2025 sebesar 96,63, maka tujuan sudah tercapai 105,03 persen.

2. Capaian Tujuan 2 "Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan":

Tujuan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul yang kedua diukur dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Target jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan tahun 2025 sejumlah 4 potensi budaya dan capaian di tahun 2025 sejumlah 4 potensi budaya, maka tujuan sudah tercapai 100 persen.

3. Capaian Sasaran Strategis 1 "Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan"

Pencapaian target sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon.

- Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025, Indeks Pelayanan Kapanewon dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Benar dan tepat dalam menyusun APBKal =  $20 \% \times (\text{jumlah desa yang menyusun APBKal tepat waktu} / \text{Jumlah desa dikapanewon}) \times 100$



- b. Benar dan tepat dalam menyusun RPKal =  $20\% \times (\text{jumlah desa yang menyusun RPKal tepat waktu dibagi Jumlah desa dikapanewon}) \times 100$
  - c. Jumlah KK miskin =  $20\% \times (\text{jumlah KK miskin yang tertangani dibagi jumlah KK miskin}) \times 100$
  - d. Jumlah penanganan ketentraman dan ketertiban umum =  $20\% \times (\text{jumlah penanganan ketentraman dibagi jumlah kasus penanganan ketentraman}) \times 100$
  - e. Nilai IKM =  $20\% \times (\text{nilai}/100) \times 100$
  - f. Indeks =  $\Sigma$  total nilai dari 5 item tersebut di atas.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 91,80 %; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 96,63%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105,26%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 84,41 % terjadi peningkatan sebesar 12,22 %.
4. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD":
- Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,70 terealisasi 81,37. Dengan demikian kinerja Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99,60 %.



- Capaian tahun 2025 sebesar 81,37 naik dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 81,05.
5. Capaian sasaran strategis 3 "Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan":
- Diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sejumlah 4 potensi budaya; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi sejumlah 4 potensi budaya. Dengan demikian kinerja Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
  - Capaian tahun 2025 sama seperti capaian tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Aparatur (Pegawai ASN dan Pemerintah Kalurahan) agar dapat mengikuti perkembangan teknologi di bidang Pemerintahan;
2. Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.



## DAFTAR ISI

---

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah .....	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	6
E. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	20
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
A. Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	28
B. Capaian Kinerja Lainnya .....	48
C. Efisiensi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Langkah Perbaikan Kinerja .....	60



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	9
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	10
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025 .....	10
Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026 .....	13
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	14
Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	15
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Panewu Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	21
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Panewu Ponjong Tahun 2025 .....	22
Tabel II.6 Anggaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 .....	22
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	28
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	29
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	30
Tabel III.4 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan .....	31
Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan .....	31
Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan .....	33
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	33
Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan .....	35
Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	40
Tabel III.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	41
Tabel III.11 Tindak lanjut atas Rekomendasi pada LHE AKIP Internal pada Kapanewon Ponjong Tahun 2024 .....	41
Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 .....	43
Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	43
Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	44
Tabel III.15 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	45



Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 pada pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	46
Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	47
Tabel III.18 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pelestarian Potensi ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	47
Tabel III.19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....	55
Tabel III.20 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	57



## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja .....	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul .....	5
Gambar II.1. E-SAKIP .....	24
Gambar II.2. SIPANDA .....	24
Gambar II.3. SIPD .....	25
Gambar II.4. SIPAKGK .....	26
Gambar II.5. Sim Aset .....	26
Gambar II.6. Persediaan .....	27
Gambar III.1. Penyelenggaraan Pelayanan Umum .....	36
Gambar III.2. Musrenbangkal .....	36
Gambar III.3. Koordinasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) .....	37
Gambar III.4. Safari Tawarikh .....	37
Gambar III.5. Pembinaan Linmas .....	38
Gambar III.6. Pencermatan Desk Evaluasi Raperkal tentang APBKal .....	39
Gambar III.7. Akses Ramah Disabilitas .....	49
Gambar III.8. Kursi Roda untuk Difabel dan/atau Lanjut Usia .....	50
Gambar III.9. Droning Air .....	52
Gambar III.10. Jambanisasi .....	53
Gambar III.11. Paskibra mengikuti Orientasi di TBG .....	54



**BAB I berisi:**

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

# BAB I

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.



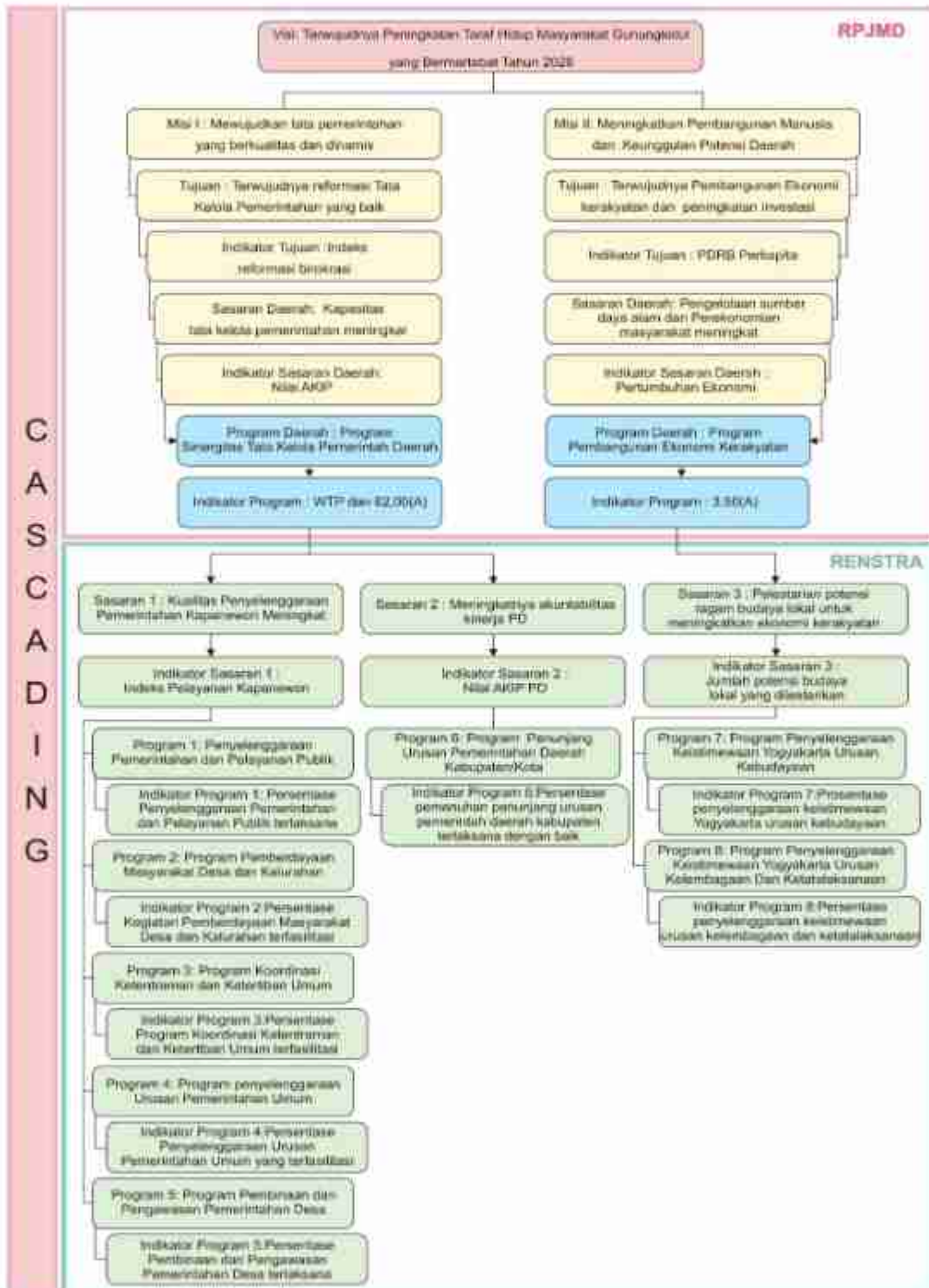
Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026. Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

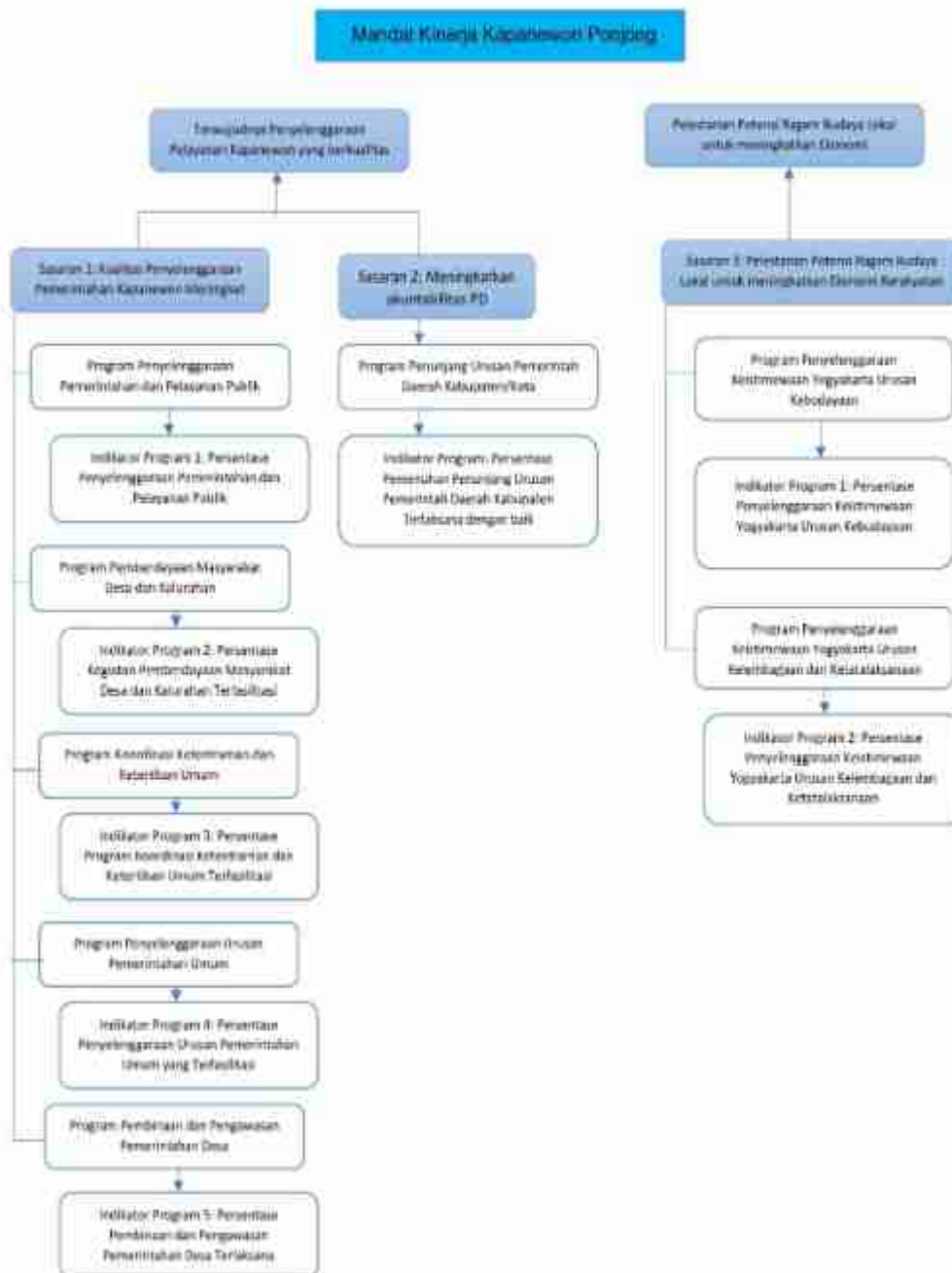


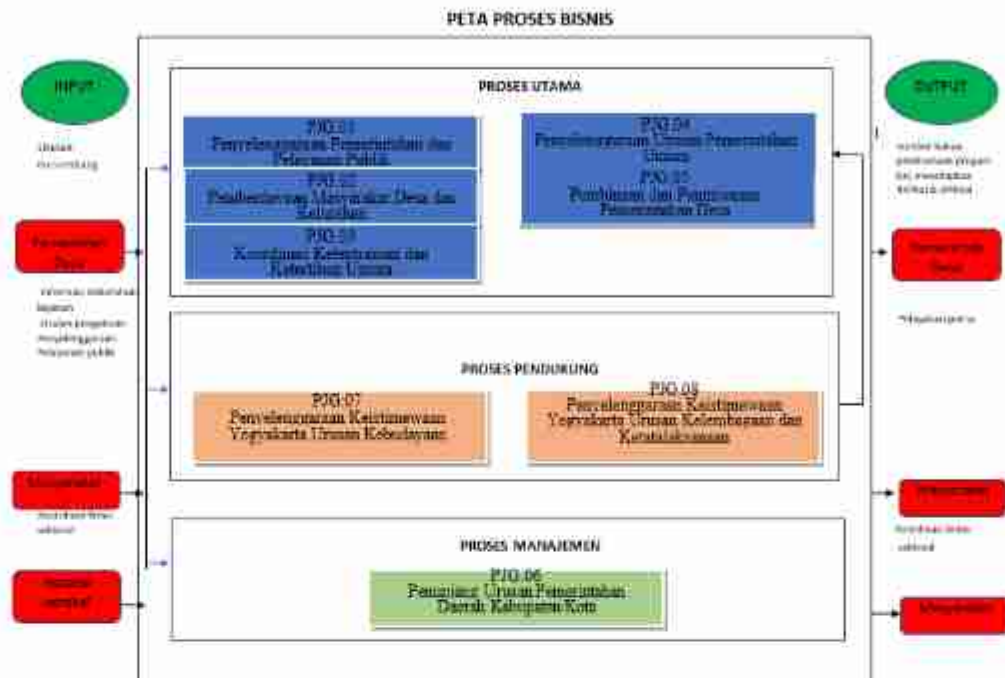
Gambar I.1. Cascading Kinerja



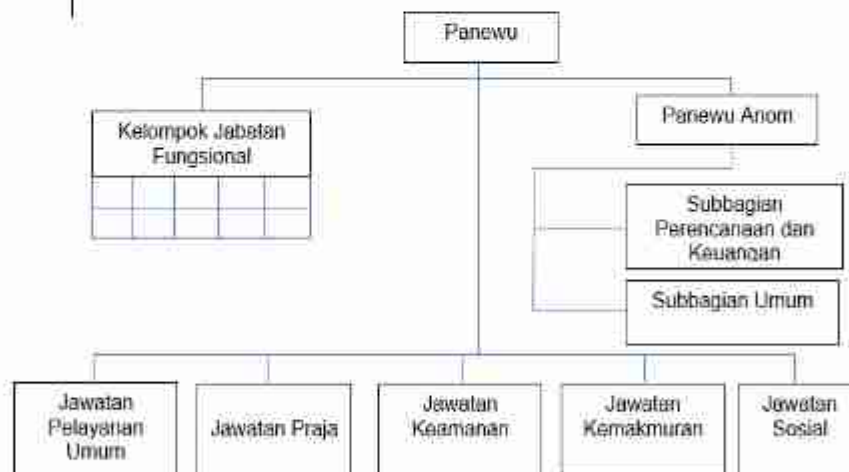
### C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





**Struktur Organisasi Kapanewon**



Gambar 1.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul



#### D. Tugas dan Fungsi

---

Kapanewon Ponjong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
4. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah *Kapanewon*;



9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
10. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di *Kapanewon*;
11. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang *Kapanewon*;
12. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
13. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah *Kapanewon*;
14. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
15. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

#### **E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

---

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **Bidang Sosial Budaya**

1. Rendahnya minat generasi muda dalam upaya pelestarian budaya.
2. Inventarisasi budaya yang ada di masyarakat belum optimal.
3. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
4. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan Pendidikan berbasis lapangan kerja.



### **Bidang Ekonomi**

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar perangkat daerah maupun sumber dana.

### **Bidang Fisik dan Prasarana**

1. Adanya keterbatasan sarana gedung pelayanan di Kapanewon Ponjong sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah pada sebagian besar Kalurahan di Kapanewon Ponjong.

### **Bidang Pemerintahan dan Ketertiban**

1. Keterbatasan personil/ASN baik dalam jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan.
3. Masih adanya sebagian kalurahan yang terlambat dalam penyusunan laporan.
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Belum optimalnya tertib administrasi Tanah Kas Kalurahan.
6. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi penanganan bencana.



## F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1.	Unsur Pimpinan												
	Panewu		1				1	1					1
2.	Unsur Pembantu Pimpinan												
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian		1	8	4	6	7	1	4		2	2	5
3.	Unsur Pelaksana												
	Jawatan-jawatan;			14	5	7	9		5	1	3	7	2
4.	Kelompok Jabatan Fungsional			7	1		1			1		0	1
	Jumlah	54					18	2	9	2	5	10	9

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Ponjong Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan. Tingkat Pendidikan SDM Kapanewon Ponjong didominasi oleh jenjang Pendidikan S1 sebanyak 9 orang (50%) dan jenjang Pendidikan SMA sebanyak 5 orang (27,78%). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, perbedaan jumlah tersebut tidak begitu signifikan, bahkan untuk Panewu dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Untuk mendukung optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan perlu adanya penambahan pegawai baik melalui mekanisme CPNS ataupun PPPK sebanyak 36 orang.



Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Tanah	1 unit	5.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	367 unit	818.834.951,00
3	Gedung dan Bangunan	5 unit	1.359.444.747,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3 unit	10.990.000
5	Aset tetap lainnya	30	14.983.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	<i>Jumlah</i>		<b>2.209.752.698</b>

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat, dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang kerja, ruang arsip, ruang gudang, ruang pelayanan dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah/
Rekening				Perubahan	Perubahan	Berkurang
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0
4	1	2	Retribusi Daerah	0	0	0
			<i>Jumlah Pendapatan</i>	0	0	0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	1.751.605.964,00	1.651.525.226,22	-100.080.737,78
5	1	01	Belanja Pegawai	1.079.348.664,00	1.035.772.026,22	-43.576.637,78
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	665.257.300,00	608.753.300,00	-56.504.000
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	7.000.000,00	7.000.000,00	-
5	2		BELANJA MODAL	45.050.000,00	48.050.000,00	-
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.050.000,00	48.050.000,00	-
			<i>Jumlah Belanja</i>	1.796.655.964,00	1.699.575.226,22	-97.080.737,78
			<i>Total Surplus/(Defisit)</i>	-1.796.655.964,00	-1.699.575.226,22	97.080.737,78

Sumber data: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul semula Rp1.796.655.964,00 mengalami perubahan menjadi Rp1.699.575.226,22 atau berkurang Rp97.080.737,78.



**BAB II berisi:**

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Ponjong sebagai dokumen teknis operasional.

### A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat serta Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Adapun sasaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	90,72	91,20	91,50	91,70	91,80	92,00	92,00
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,70	81,00	81,25	81,50	81,70	81,80	82,00
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	4	4	4	4	4	20

## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 Terwujudnya Penyelengga raan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
		Peningkatan Kapasitas Kalurahan dalam Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas Kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
Tujuan 2: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatka n Ekonomi Kerakyatan	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya

### C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:



Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.040.000,00	37.310.000,00	2.730.000,00
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	5.560.000,00	4.270.000,00	-1.290.000,00
	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	5.560.000,00	4.270.000,00	-1.290.000,00
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	34.480.000,00	33.040.000,00	-1.440.000,00
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	34.480.000,00	33.040.000,00	-1.440.000,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>40.040.000,00</b>	<b>37.310.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	44.720.000,00	35.985.000,00	-8.735.000,00
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	31.005.000,00	26.865.000,00	-4.140.000,00
	<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	21.605.000,00	18.555.000,00	-3.050.000,00
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	9.400.000,00	8.310.000,00	-1.090.000,00
<i>Pemberdayaan Lembaga</i>	13.715.000,00	9.120.000,00	-4.595.000,00	



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)
	<i>Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	9.780.000,00	7.030.000,00	-2.750.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.935.000,00	2.090.000,00	-1.845.000,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>44.720.000,00</b>	<b>35.985.000,00</b>	<b>-8.735.000,00</b>
	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>19.345.000,00</b>	<b>17.745.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	19.345.000,00	17.745.000,00	-1.600.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.345.000,00	10.745.000,00	-1.600.000,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>19.345.000,00</b>	<b>17.745.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>115.269.900,00</b>	<b>104.479.900,00</b>	<b>-10.790.000,00</b>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	115.269.900,00	104.479.900,00	-10.790.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	108.244.900,00	100.204.900,00	-8.040.000,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)
	Republik Indonesia			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.025.000,00	4.275.000,00	-2.750.000,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>115.269.900,00</b>	<b>104.479.900,00</b>	<b>-10.790.000,00</b>
	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>63.940.000,00</b>	<b>-13.060.000,00</b>
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>77.000.000,00</i>	<i>63.940.000,00</i>	<i>-13.060.000,00</i>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.460.000,00	1.400.000,00	-1.060.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.940.000,00	5.710.000,00	-2.230.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	980.000,00	980.000,00	0,00
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.030.000,00	450.000,00	-2.580.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	59.360.000,00	53.650.000,00	-5.710.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.230.000,00	1.750.000,00	-1.480.000,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>63.940.000,00</b>	<b>-13.060.000,00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>296.374.900,00</b>	<b>259.459.900,00</b>	<b>-36.915.000,00</b>



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
Meningkatnya akuntabilitas PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.400.281.064,00	1.374.425.326,22	-25.855.737,78
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	48.405.900,00	37.635.000,00	-10.770.900,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.715.000,00	32.285.000,00	-1.430.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.290.000,00	450.000,00	-1.840.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.330.000,00	600.000,00	-1.730.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.730.000,00	2.170.000,00	-560.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.240.000,00	660.000,00	-1.580.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.570.900,00	680.000,00	-1.890.900,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.530.000,00	790.000,00	-1.740.000,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.116.018.664,00	1.071.782.026,22	-44.236.637,78
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.079.348.664,00	1.035.772.026,22	-43.576.637,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.940.000,00	34.280.000,00	-660.000,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	11.341.900,00	8.506.900,00	-2.835.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.341.900,00	8.506.900,00	-2.835.000,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	67.892.000,00	66.331.000,00	-1.561.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.481.000,00	55.760.000,00	279.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.539.000,00	3.539.000,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.000,00	600.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.240.000,00	400.000,00	-1.840.000,00
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	36.668.000,00	36.018.000,00	-650.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	350.000,00	-650.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.668.000,00	35.668.000,00	0,00
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	119.954.600,00	154.152.400,00	34.197.800,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00
	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.767.100,00	77.764.900,00	33.997.800,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.987.500,00	30.187.500,00	200.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.400.281.064,00</b>	<b>1.374.425.326,22</b>	<b>-25.855.737,78</b>



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	40.000.000,00	35.690.000,00	-4.310.000,00
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	35.690.000,00	-4.310.000,00
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	40.000.000,00	35.690.000,00	-4.310.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>65.690.000,00</b>	<b>-34.310.000,00</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Panewu Ponjong yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:



Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Panewu Ponjong Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	92,00
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	91,80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,70
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	4

Pada tahun 2025, Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan penetapan target kinerja, adanya pergantian pejabat, *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Panewu Ponjong Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	91,80
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	91,80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,70
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	4

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.6 Anggaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp	30.000.000,00	DAIS
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp	35.690.000,00	
3.	Program Penunjang Pemerintahan Urusan Daerah	Rp	1.374.425.326,22	APBD



No	Program	Anggaran		Keterangan
	Kabupaten			
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	37.310.000,00	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	35.985.000,00	
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	17.745.000,00	
7.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	104.479.900,00	
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	63.940.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.699.575.226,22</b>	

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja tidak berubah, target kinerja berubah menjadi target yang digunakan dalam renstra tahun 2025 dan volume anggaran berkurang 5,56% sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.



## E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* ([e-gov.gunungkidulkab.go.id](http://e-gov.gunungkidulkab.go.id))



sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home>

Gambar II.1. E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) ([sipanda.gunungkidulkab.go.id](http://sipanda.gunungkidulkab.go.id))



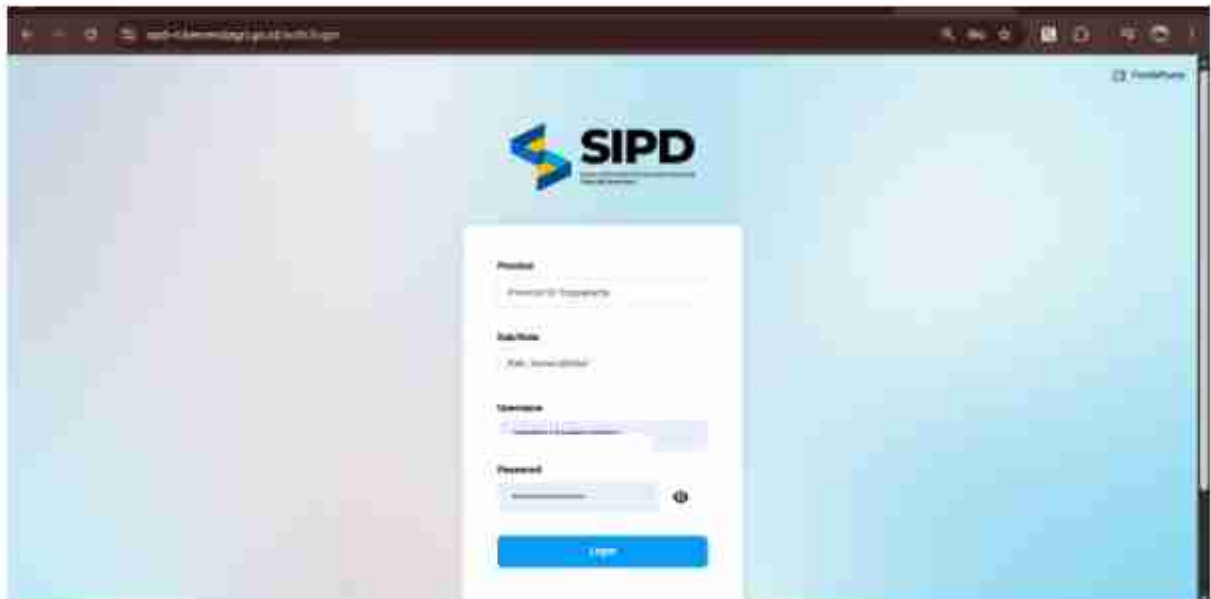
sumber: [https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/auth/Auth/login\\_frontend/](https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/auth/Auth/login_frontend/)

Gambar II.2. SiPANDA

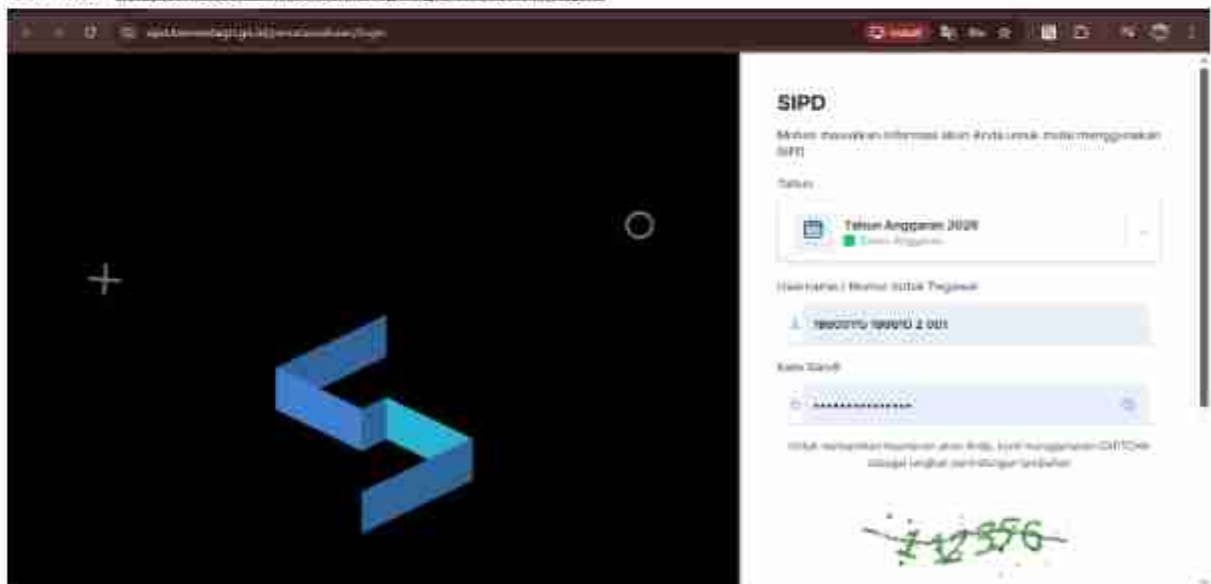


### 3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login>



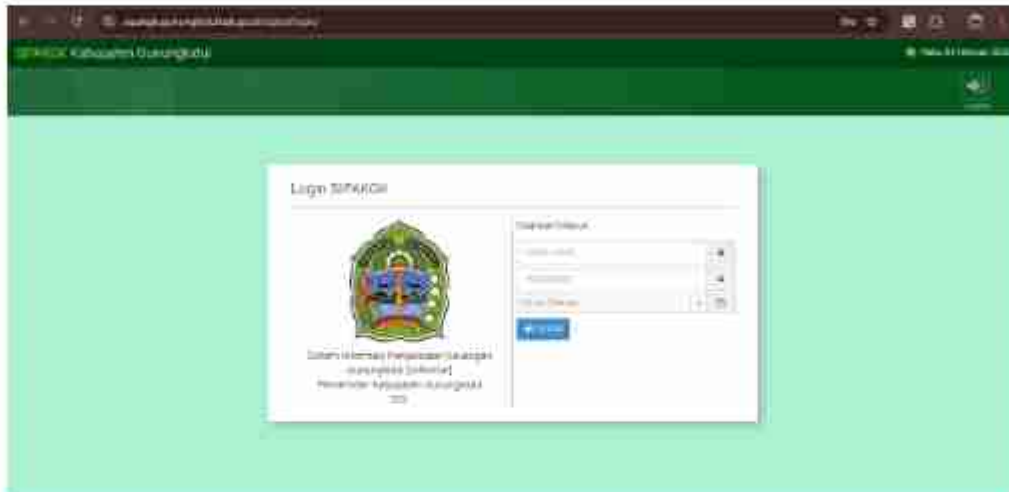
Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login>

Gambar II.3. SIPD



#### 4. SIPAKGK

SIPAKGK merupakan sistem pengolah data keuangan yang berisi target dan realisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban yang tercatat setiap bulan.



sumber: <https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/sipkd/>

Gambar II.4. SIPAKGK

5. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset), merupakan aplikasi yang digunakan penyusunan dan pelaporan aset. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:

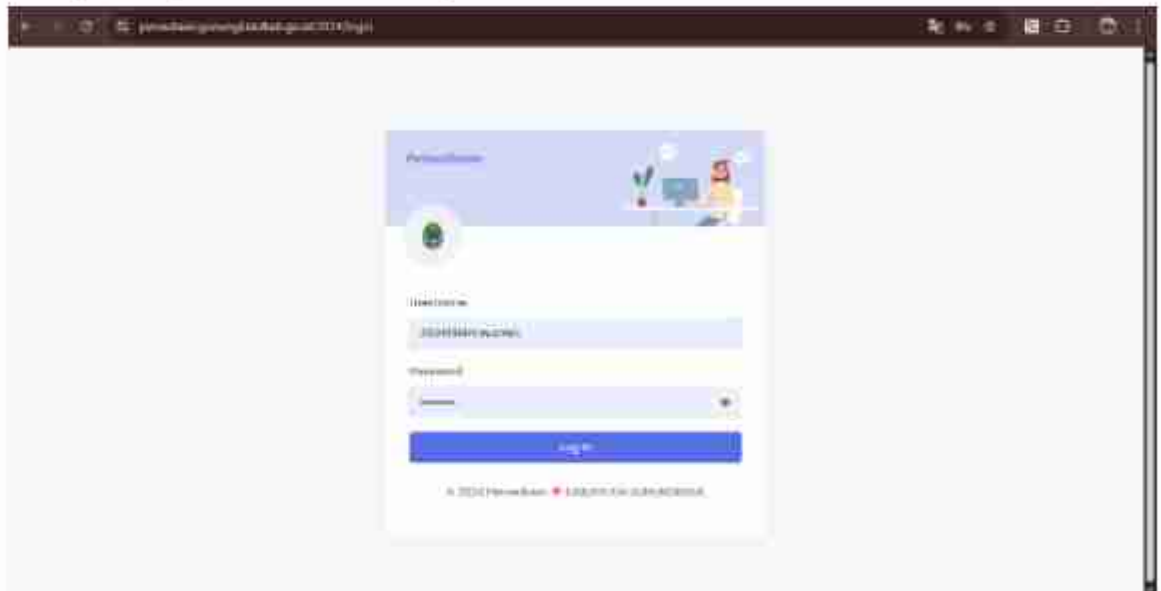


sumber: <https://aset.gunungkidulkab.go.id/2025>

Gambar II.5. Sim Aset



6. Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja dalam penyusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://persediaan.gunungkidulkab.go.id/2025/login>

Gambar II.6. Persediaan



**BAB III berisi:**

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025			KRITERIA / KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	90,72	84,41	91,80	96,63	105,26	Sangat Tinggi	92,00
2.	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indeks	80,70	81,05	81,70	81,37	99,23	Sangat Tinggi	82,00
3.	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	0	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	4

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### **Tujuan 1: Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas**

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon. Pencapaian tujuan ini didukung dengan 2 sasaran yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat. Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang sama dengan sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat, sehingga capaian tujuan Kapanewon Ponjong dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis Kapanewon Ponjong. Dengan demikian, secara tidak langsung capaian sasaran strategis juga mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.



Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat**

Kinerja sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai Indeks Kepuasan Masyarakat}]$ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = <math>(\Sigma \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%</math> Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</li> <li>- Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = <math>(\Sigma \text{ Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%</math> Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1</li> <li>- Persentase KK miskin yang tertangani = <math>(\Sigma \text{ KK miskin penerima bantuan} / \Sigma \text{ KK Miskin}) \times 100\%</math></li> <li>- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = <math>(\Sigma \text{ penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \Sigma \text{ Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%</math></li> <li>- Nilai indeks kepuasan masyarakat = <math>(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}</math> Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 9 = 0,11. Untuk memudahkan interpretasi:</li> </ul>



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus IKM Unit Pelayanan x 25  Tipologi data: Non kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran  
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,80	96,63	105,26	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 105,26% termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 96,63 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 91,80.

Rincian jumlah indikator sasaran yang tercapai pada masing-masing komponen dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Realisasi	Keterangan
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,80	96,63	Capaian Indeks Pelayanan Kapanewon tahun 2025 adalah 96,63 dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu dalam menyusun APBKal : 11 kalurahan dari 11 Kalurahan, nilainya 100%.</li> <li>2. Tepat waktu dalam menyusun RPKKal: 11 Kalurahan dari 11 Kalurahan, nilainya : 100%</li> <li>3. Jumlah KK miskin tertangani sesuai dengan kegiatan dan kewenangan Kapanewon Ponjong tahun 2025: 100%</li> <li>4. Jumlah penanganan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025: 100% (tidak terjadi kasus gangguan)</li> </ol>



Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Realisasi	Keterangan
				5. Nilai IKM tahun 2025 adalah nilai rata-rata (semester 1 dan semester 2) : 83,17.

Dari data tersebut Penyusunan APBKal dan Penyusunan RKPkal pada Kalurahan di Kapanewon Ponjong terlaksana tepat waktu sedangkan realisasi terhadap target KK miskin tertangani tercapai sepenuhnya dimana data tersebut bersumber pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sedangkan dalam penanganan ketertiban di Kapanewon Ponjong tidak ada kasus yang tidak terselesaikan. Meta indikator lain yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon adalah hasil akhir penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025, indeks kepuasan masyarakat Kapanewon Ponjong pada semester I memperoleh nilai 85,75 dan semester II memperoleh nilai 80,59, sehingga indeks kepuasan masyarakat Kapanewon Ponjong tahun 2025 diperoleh rata-rata 83,17.

Realisasi kinerja sebesar 96,63 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,39	84,41	96,63	92,00	105,03

Pencapaian target Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis kapanewon, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>



NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$



NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
				Tipologi data: Non kumulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	105,26	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;



Gambar III.1 Penyelenggaraan Pelayanan Umum

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan;



Gambar III.2 Musrenbangkal



3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Gambar III.3 Koordinasi PEKAT (Penyakit Masyarakat)



Gambar III.4 Safari Tarawih



4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Gambar III.5 Pembinaan Linmas

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa





Gambar III.6 Pencermatan Desk Evaluasi Raperkal tentang APBKal

Perbandingan capaian kinerja dengan unit organisasi lain tidak dapat dilakukan secara kuantitatif karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah. Meskipun demikian, penilaian kinerja tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul adalah adanya perbaikan metode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dikarenakan adanya kerancuan pelaksanaan pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kapanewon Ponjong serta keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi di bidang Pemerintahan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pengambil kebijakan mengenai kebijakan dan penyamaan persepsi ketentuan pelayanan, serta melakukan peningkatan kapasitas Pegawai dengan melaksanakan bimbingan teknis.



### Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga disebabkan oleh dukungan kepemimpinan yang efektif dan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

### Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 81,70, namun sampai laporan ini disusun, LHE AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Kapanewon Ponjong mendapatkan nilai 81,37 masuk kategori Sangat Baik pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024. Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran 1	Indikator 2	Meta Indikator 3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Ponjong Tahun n-1.</p> <p>Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kinerja bobot 30%;</li> <li>2. Pengukuran kinerja bobot 30%;</li> <li>3. Pelaporan Kinerja bobot 15%;</li> <li>4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%.</li> </ol> <p>Interpretasi data:</p> <p>Predikat AA (Nilai &gt;90-100)                      Predikat A (Nilai &gt;80-90)                      Predikat BB (Nilai &gt;70-80)                      Predikat B (Nilai &gt;60-70)                      Predikat CC (Nilai &gt;50-60)                      Predikat C (Nilai &gt;30-50)                      Predikat D (Nilai &gt;0-30)</p>



Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 81,37 (delapan puluh satu koma tiga tujuh).

Tabel III.10 Capaian Sasaran  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,70	81,37	99,60	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 81,70 terealisasi 81,37 sehingga capaian kinerja mencapai 99,60%. Dalam LHE AKIP Kapanewon Ponjong tahun 2024 terdapat beberapa catatan dan rekomendasi terhadap implementasi SAKIP Kapanewon Ponjong yang kemudian menjadi komitmen seluruh entitas pada Kapanewon Ponjong untuk menindaklanjutinya. Komitmen ini merupakan upaya terus menerus yang dilakukan untuk menuju keadaan dan mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/Ev-LKj/16 tanggal 26 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Ponjong terdapat tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut:

Tabel III.11 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE AKIP Internal pada Kapanewon Ponjong Tahun 2024

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak ada rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesulan aktivitas dalam mencapai kinerja	Agar hasil pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian aktivitas yang lebih	Telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Rencana Aksi Perubahan, Laporan



No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
			optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja	Monev Triwulanan, dan Laporan Pengendalian
3	Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan kinerja belum menyajikan seluruh Informasi yang mendukung pencapaian kinerja (Perjanjian kinerja yang dilampirkan baru Perjanjian Kinerja Panewu);</li> <li>2. Dokumen telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tetapi terdapat ketidakkonsistenan pengungkapan antara target, sasaran dan realisasi pada penyajian tabel yang berbeda;</li> <li>3. Penyajian Informasi dalam Laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan</li> <li>4. Informasi dalam pelaporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar menyajikan Informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja di masa yang akan datang;</li> <li>2. Agar pada penyusunan Laporan di periode yang akan datang lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi;</li> <li>3. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan kinerja terhadap kinerja pada seluruh pegawai dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja, serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian Informasi Laporan kinerja; dan</li> <li>4. Agar Informasi dalam Laporan kinerja berkala digunakan dalam mengevaluasi pencapaian target sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja secara lebih optimal serta sebagai acuan dalam monev berkala berikutnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditindaklanjuti dengan penyajian Informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja tahun 2025.;</li> <li>2. Telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan yang menyajikan Informasi dan data dukung yang lengkap dan konsisten.</li> <li>3. Telah ditindaklanjuti dengan rakor rutin dan berkala terkait internalisasi pentingnya kepemilikan kinerja pada seluruh pegawai yang dipimpin oleh Panewu serta koordinasi evaluasi capaian kinerja, perumusan tindak lanjut dan pelaporan kinerja. (Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi terlampir).</li> <li>4. Telah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi rutin membahas evaluasi capaian kinerja, permasalahan, dan rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja serta mengevaluasi Rencana Aksi dan menyesuikannya berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025</li> </ol>



No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,60	81,05	81,37	82,00	99,23

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yaitu 80,60 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>



Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	99,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi internal untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja internal.



### Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

### Tujuan 2 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Ponjong dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

### Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan.

Tabel III.15 Capaian Sasaran  
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi  
Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4	4	100	Sangat Tinggi



Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 4 terealisasi 4 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4	4	4	4	100

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 konsisten mencapai target yaitu 4. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan dan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>

Tabel III.18 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	100	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	100	100 Sangat Tinggi



Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul adalah minimnya minat masyarakat dalam melestarikan budaya lokal yogyakarta. Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan Kalurahan terkait budaya yang akan dilestarikan.

### **Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran**

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga disebabkan oleh dukungan masyarakat pegiat seni yang aktif dalam pelestarian budaya.

## **B. Capaian Kinerja Lainnya**

---

### **1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Kapanewon Ponjong**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kapanewon Ponjong mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan



tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus:

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

1. Bangunan ramah disabilitas telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat.



Gambar III.7 Akses Ramah Disabilitas



2. Kursi roda yang dapat digunakan orang difabel dan/atau lanjut usia.



Gambar III.8 Kursi Roda untuk Difabel dan/atau Lanjut Usia

3. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
4. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
5. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

## **2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan**

Perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kapanewon Ponjong diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.



Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Ponjong. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statements*) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Ponjong, antara lain:

a. Dropped air sebagai bentuk penanganan masalah kekeringan di wilayah Kapanewon Ponjong

Kapanewon Ponjong dalam perannya menangani masalah kemiskinan salah satunya dengan memberikan stimulan berupa bansos. Kapanewon Ponjong terdiri dari 11 kalurahan, dari jumlah tersebut terdapat 8 kalurahan yang mengalami kekeringan di waktu kemarau. Sehingga kalurahan tersebut mengalami kekurangan air bersih. Pada tahun 2025, Kapanewon Ponjong menganggarkan adanya dropped air untuk KK miskin sebanyak 200 tangki (4000 liter / tangki). Pembagian dropped air tersebut untuk Kalurahan Sawahan (3 Padukuhan), Tambakromo (2 Padukuhan), Kenteng (2 Padukuhan) dan Sumbergiri (3 Padukuhan). Bantuan yang diberikan berupa dropped air bersih.



Gambar III.9 Dropping Air

- b. Jambanisasi sebagai bentuk penanganan masalah kemiskinan di wilayah Kapanewon Ponjong.

Kapanewon Ponjong dalam perannya menangani masalah kemiskinan salah satunya dengan memberikan stimulan berupa bansos. Data kemiskinan berasal dari data PMKS. Kapanewon Ponjong terdiri dari 11 kalurahan. Dari data DTKS, jumlah KK miskin di wilayah Kapanewon Ponjong adalah 10.721 KK. Dari jumlah tersebut terdapat 833 KK yang belum memiliki jamban sehat dan *septic tank*. Pada tahun 2025, Kapanewon Ponjong menganggarkan adanya jamban sehat dan *septic tank* untuk KK miskin untuk 1 (satu) KK. Kegiatan tersebut direalisasikan untuk 1 (satu) KK perempuan di wilayah Kalurahan Bedoyo.



Gambar III.10 Jambanisasi

- c. Menerapkan sistem seleksi yang transparan dan terbuka untuk semua calon anggota Paskibra, tanpa diskriminasi gender.

Paskibra adalah bagian penting dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI, dalam hal ini Kapanewon Ponjong menganggarkan untuk kegiatan rutin tersebut. Paskibra tersebut dipilih dari Tim Kapanewon Ponjong dengan menunjuk salah satu SLTA/SMA sederajat di Kapanewon Ponjong. Proses seleksi calon paskibra Kapanewon belum melibatkan semua sekolah SMK/SMA sederajat yang ada di Kapanewon Ponjong, sehingga perlu adanya proses seleksi untuk mendapat calon paskibra yang terbaik.



Gambar III.11 Paskibra mengikuti Orientasi di TBG

### 3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain pemanfaatan media sosial misalnya layanan PPID, Instagram dan youtube untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.

#### C. Efisiensi Anggaran

---

Anggaran belanja pada Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025 tertanggal 3 Desember 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.699.575.226,22 dan telah



menyerap anggaran sebesar Rp1.682.010.146,00 atau 98,97%, sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17.565.080,22 atau 1,03%

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Selisih (Rp)	Efisiensi
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	30.000.000,00	29.999.856,00	99,99	144,00	0,00048
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	29.999.856,00	99,99	144,00	0,00048
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATAKALSANAAN</b>	35.690.000,00	35.629.355,00	99,83	60.645,00	0,17
1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.690.000,00	35.629.355,00	99,83	60.645,00	0,17
3.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.374.425.326,22	1.365.007.929,00	99,31	9.417.397,22	0,67
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.635.000,00	36.485.000,00	96,94	1.150.000,00	3,06
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.071.782.026,22	1.070.496.915,00	99,88	1.285.111,22	0,12



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Selisih (Rp)	Efisiensi
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.506.900,00	5.739.319,00	67,46	2.767.581,00	32,53
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.331.000,00	64.901.436,00	97,84	1.429.564,00	2,16
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.018.000,00	34.923.585,00	96,96	1.094.415,00	3,04
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.152.400,00	152.461.674,00	98,90	1.690.726,00	1,10
4.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>37.310.000,00</b>	<b>36.210.000,00</b>	<b>97,05</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2,95</b>
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.270.000,00	4.270.000,00	100,00	0,00	0
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	33.040.000,00	31.940.000,00	96,67	1.100.000,00	3,33
5.	<b>PROGRAM PEMDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>35.985.000,00</b>	<b>35.915.000,00</b>	<b>99,81</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,19</b>
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.865.000,00	26.795.000,00	99,74	70.000,00	0,26
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	0,00	0
6.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>17.745.000,00</b>	<b>17.745.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Selisih (Rp)	Efisiensi
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.745.000,00	17.745.000,00	100,00	0,00	0
7.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>104.479.900,00</b>	<b>98.083.503,00</b>	<b>93,88</b>	<b>6.396.397,00</b>	<b>6,12</b>
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	104.479.900,00	98.083.503,00	93,88	6.396.397,00	6,12
8.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>63.940.000,00</b>	<b>63.419.503,00</b>	<b>99,19</b>	<b>520.497,00</b>	<b>0,81</b>
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.940.000,00	63.419.503,00	99,19	520.497,00	0,81
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.699.575.226,22</b>	<b>1.682.010.146,00</b>	<b>98,97</b>	<b>17.565.080,22</b>	<b>1,03</b>

Sumber Data: SPJ Fungsional Kapanewon Ponjong bulan Desember 2025

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	91,80	96,63	105,26	259.459.900,00	251.373.006,00	96,88	3,12
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	81,70	81,37	99,60	1.374.425.326,22	1.365.007.929,00	99,31	0,69



Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	4	4	100	65.690.000,00	65.629.211,00	99,91	0,09
Jumlah Belanja Total				<b>1.699.575.226,22</b>	<b>1.682.010.146,00</b>	<b>98,97</b>	<b>1,03</b>

Sumber Data : Laporan Evaluasi RKPD Kapanewon Ponjong Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan tabel III.19 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1.699.575.226,22 terealisasi Rp1.682.010.146,00 atau 98,97% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp17.565.080,22 atau 1,03% yang bersumber dari:

- Sisa Pembayaran BPJS Kesehatan
- Sisa Belanja Pakaian Olahraga untuk Paskibra
- Efisiensi belanja upah THL



*BAB IV berisi:*

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

## BAB IV

---

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

LKJIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Ponjong, LKJIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKJIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKJIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Ponjong pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Ponjong untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori



sangat tinggi, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih perlu ditingkatkan.

*Kedua*, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

*Ketiga*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKJIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

## **B. Langkah Perbaikan Kinerja**

---

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
2. Melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja.



# LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kapanewon Ponjong Tahun 2025
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Ponjong Tahun 2025
3. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Kapanewon Ponjong Tahun 2024
4. Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Kapanewon Ponjong Tahun 2024
5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE AKIP Internal pada Kapanewon Ponjong Tahun 2024
6. Rencana Aksi Kapanewon Ponjong Tahun 2025
7. Perubahan Rencana Aksi Kapanewon Ponjong Tahun 2025
8. Sampel Laporan Pengendalian yang terdapat Kendala dan Rencana Tindak Lanjut
9. Undangan, Notulen, Daftar Hadir, serta Dokumentasi Rapat
10. Berita Acara Monev dan Laporan Realisasi Anggaran triwulan III dan IV 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦤꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S. Sos. MM  
Jabatan : Panewu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA  
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025  
Pihak Kesatu  
  
IRWAN TRIWIBOWO, S. Sos. MM

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON PONJONG**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2025	Indeks	92,00
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	91,80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,70
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	4

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 60.000.000,00	DANAIS
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 40.000.000,00	DANAIS
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.400.281.064,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 40.040.000,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 44.720.000,00	APBD
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.345.000,00	APBD
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 115.269.900,00	APBD
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 77.000.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.796.655.964,00</b>	





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Srimanto, S.Sos.,MM.  
Jabatan : Panewu Anom Ponjong

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM.  
Jabatan : Panewu Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,  
IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM.

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kesatu,

AGUS SRIMANTO, S.Sos.,MM.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANEWU ANOM KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	4,175
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	8,58
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	48,43
1.5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60
1.6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	93

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 1.400.281.064,00	APBD
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 48.405.900,00	APBD

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.116.018.664,00	APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 11.341.900,00	APBD
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 67.892.000,00	APBD
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36.668.000,00	APBD
1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 119.954.600,00	APBD

Ponjong, Januari 2025


 Pihak Kedua,  
  
 IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.

Pihak Kesatu,  
  
 AGUS SRIMANTO, S.Sos., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJIYO, S.E  
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SRIMANTO, S.Sos.,MM.  
Jabatan : Panewu Anom Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

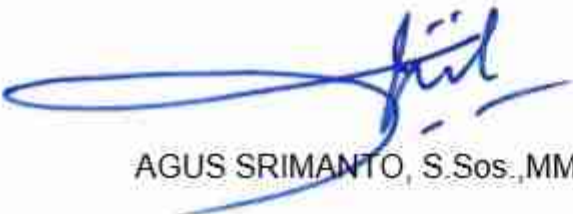
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kesatu,



AGUS SRIMANTO, S.Sos.,MM.



MUJIYO, S.E.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17
7.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	196
8.	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1
9.	Tersusunnya Dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/	Dokumen	13

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD		

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	33.715.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	2.290.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	2.330.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	2.730.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	2.240.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	2.570.900,00	APBD
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	1.079.348.664,00	APBD
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	1.730.000,00	APBD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	34.940.000,00	APBD

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua,



AGUS SRIMANTO, S.Sos., MM.

Pihak Kesatu,



MUJIYO, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARTIMAN, S.I.P  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SRIMANTO, S.Sos.,MM.  
Jabatan : Panewu Anom Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

  
AGUS SRIMANTO, S.Sos.,MM.

  
PARTIMAN, S.I.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KASUBBAG UMUM KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
2.	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3.	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
4.	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7
5.	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6
6.	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15
7.	Terfasilitasnya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
8.	Terfasilitasnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10
9.	Terfasilitasnya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
10.	Terfasilitasnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60
11.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan pembayaran Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64

12.	Terpeliharanya Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10
13.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25
14.	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
15.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.530.000,00	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 11.341.900,00	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.225.000,00	APBD
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 55.481.000,00	APBD
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.539.000,00	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.807.000,00	APBD
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 600.000,00	APBD
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2.240.000,00	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.000.000,00	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 35.668.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 40.300.000,00	APBD

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
12.	Pemeliharaan Mebel	Rp 500.000,00	APBD
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.400.000,00	APBD
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 43.767.100,00	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 29.987.500,00	APBD

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua,



AGUS SRIMANTO, S.Sos.,MM.

Pihak Kesatu,



PARTIMAN, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYATNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.  
Jabatan : Panewu Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

  
IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.  


  
SUYATNO, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	3
2.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3
3.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	11
4.	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 2.460.000,00	APBD
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 7.940.000,00	APBD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 980.000,00	APBD
4. Rekomendasi pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 3.030.000,00	APBD

Ponjong, Januari 2025



Pihak Kedua,

JEMAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.

Pihak Kesatu,

SUYATNO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBAROKHIM, S.Sos  
Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.  
Jabatan : Panewu Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.

SUBAROKHIM, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1
2.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	5
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2
4.	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
5.	Terfasilitasinya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Rp 5.560.000,00	APBD
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 59.360.000,00	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.	Rp 9.780.000,00	APBD
4. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp 12.345.000,00	APBD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
5. Gelar Budaya Jogja	Rp 60.000.000,00	DAIS

Ponjong, Januari 2025



Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.

Pihak Kesatu,

SUBAROKHIM, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ETIK SISMAWATI, S.Sos  
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.  
Jabatan : Panewu Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,



IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.

ETIK SISMAWATI, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	3
2.	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13
3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2
4.	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	3

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 21.605.000,00	APBD
2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 9.400.000,00	APBD

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Rp 3.935.000,00	APBD
4.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 40.000.000,00	DAIS

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM.

ETIK SISMAWATI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHTAR HASAN, S.Sos  
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.  
Jabatan : Panewu Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

  
IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.  


  
MUKHTAR HASAN, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2
2.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5
4.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 7.000.000,00	APBD
2.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp 108.244.900,00	APBD
3.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 7.025.000,00	APBD
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp 3.230.000,00	APBD

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua



IRWAN TR WIBOWO, S.Sos., MM.

Pihak Kesatu

MUKHTAR HASAN, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon: (0274) 3950002  
Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUJIYANTO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, MM.  
Jabatan : Panewu Ponjong

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM.

PUJIYANTO, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON PONJONG

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 34.480.000,00	APBD

Ponjong, Januari 2025



Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM.

Pihak Kesatu,

PUJIYANTO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SRIMANTO, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu Anom Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ASIH TRIWAHYUNI, S.STP, M.Si

Jabatan : Panewu Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, 4 Desember 2025

Pihak Kesatu,

AGUS SRIMANTO, S.Sos, MM



Pihak Kedua,

ASIH TRIWAHYUNI, S.STP, M.Si

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANEWU ANOM KAPANEWON PONJONG**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tercapainya pemenuhan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik	Person	100,00
1.1	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks	4,175
1.2	Tertaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	8,58
1.3	Tertaksananya Pengadministrasian Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Tertaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Indeks administrasi umum perangkat daerah	Indeks	46,43
1.5	Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60
1.6	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	93

No.	Program/Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.374.425.326,00	APBD
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37.635.000,00	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.071.782.026,00	APBD
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.506.900,00	APBD
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 66.331.000,00	APBD
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 36.016.000,00	APBD
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 154.152.400,00	APBD



ASRI WAHYUNI, S.STP, M.SI

Panjong, 4 Desember 2025  
Pihak Kesatu

*Agus Srianto*

AGUS SRIMANTO, S. Sos., MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤꦺꦤ꧀

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARTIMAN, S.IP

Jabatan : Kasubbag Umum Kapanewon Ponjong

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SRIMANTO, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu Anom Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
AGUS SRIMANTO, S.Sos, MM

Ponjong, 2 September 2025  
Pihak Kesatu,

  
PARTIMAN, S.IP

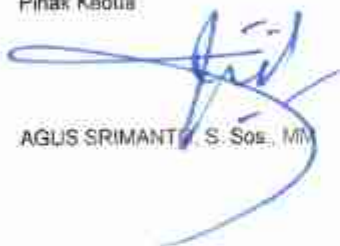
**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KASUBBAG UMUM KAPANEWON PONJONG**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
2	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	paket	14
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	6
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13
7	Terselenggaranya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10
9	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
10	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporen	60
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64
12	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10
13	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	13
14	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
15	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3

No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 790.000,00	APBD
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 8.506.900,00	APBD
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.225.000,00	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 55.760.000,00	APBD
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.539.000,00	APBD

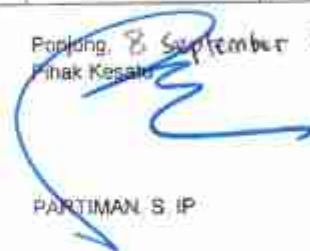
No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.807.000,00	APBD
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 600.000,00	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 400.000,00	APBD
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 350.000,00	APBD
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 35.668.000,00	APBD
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 40.300.000,00	APBD
12	Pemeliharaan Mebel	Rp 500.000,00	APBD
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.400.000,00	APBD
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 77.784.900,00	APBD
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 30.187.500,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 265.798.300,00</b>	

Pihak Kedua



AGLIS SRIMANTO, S. Sos., MM

Padjadj, 8 September 2025  
Pihak Kesatu



PARTIMAN, S. IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦤꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARZUKOH, S.M

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon Ponjong

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SRIMANTO, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu Anom Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUS SRIMANTO, S.Sos, MM

Ponjong, 4 Desember 2025

Pihak Kesatu,

MARZUKOH, S.M

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON PONJONG**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196
2	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
7	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17
8	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
9	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	13

No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.285.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 450.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 600.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 2.170.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 660.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 680.000,00	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.035.772.025,00	APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.730.000,00	APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 34.280.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.113.107.025,00</b>	

Pihak Kedua

AGUS SRIMANTO, S. Sos. MM

Ponjong 4 Desember 2025  
Pihak Kesatu

MARZUKOH, S M



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYATNO, S.IP

Jabatan : Kepala Jawatan Praja Kapanewon Ponjong

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos, MM

Ponjong, 8 September 2025

Pihak Kesatu,

SUYATNO, S.IP

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JAWATAN PRAJA KAPANEWON PONJONG**

No	Sesaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Tertaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	24
2	Tertaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1
3	Tertaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	11
4	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 1.400.000,00	APBD
2	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 5.710.000,00	APBD
3	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 980.000,00	APBD
4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 450.000	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.540.000,00</b>	



Pihak Kedua  
*[Signature]*

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos, MM

Ponjong, 8 September 2025  
Pihak Kesatu

*[Signature]*

SUYATNO, S. Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤꦺꦤ꧀

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892

Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id, Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBAROKHIM, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Ponjong

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, 8 September 2025

Pihak Kesatu,

SUBAROKHIM, S.Sos



Pihak Kedua

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos, MM

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JAWATAN SOSIAL KAPANEWON PONJONG**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	2
3	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
4	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	5
5	Terlaksananya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 4.270.000,00	APBD
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 7.030.000,00	APBD
3	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 10.745.000,00	APBD
4	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 53.650.000,00	APBD
5	Gelar Budaya Jogja	Rp 30.000.000,00	DANAIS
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 105.695.000,00</b>	



Pihak Kasala

ISWAN TRWIBOWO, S.Sos, MM

Ponjong, 8 September 2025  
Pihak Kasala

  
SUBAROKHIM, S. Sos



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON PONJONG**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Tertaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	3
2	Tertaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13
3	Tertaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2
4	Tertaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	3

No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 18.555.000,00	APBD
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 8.310.000,00	APBD
3	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 2.090.000,00	APBD
4	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 35.650.000,00	DANAIS
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 64.645.000,00</b>	



IRWAN TRIVIBOWO, S. Sos. MM

Ponjong, 2 September 2025  
Pihak Kesatu

ETIK SISMAWATI, S. Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦶꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul, Ponjong Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

---

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHTAR HASAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Ponjong

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponjong, 8 September 2025

Pihak Kesatu,

MUKHTAR HASAN, S.Sos



Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos, MM

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON PONJONG**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Tertaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
2	Tertaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemutakhiran dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75
3	Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Dokumen	6
4	Tertaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	Dokumen	2

No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 7.000.000,00	APBD
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 100.204.900,00	APBD
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 4.275.000,00	APBD
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	Rp 1.750.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 113.229.900,00</b>	



Ponjong, 8 September 2025  
Pihak Kesatu

  
MUHKTAR HASAN, S. Sof



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON PONJONG**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

No.	Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 33.040.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	Rp 33.040.000,00	



Bihak Kedua

IRWAN TRIWIBOWO, S Sos, MM

Ponjong 8 September 2025  
Pihak Kesatu

PUJIYANTO, S. Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
*Inspektorat Daerah*

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812  
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman : [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

Wonosari, 26 Maret 2025

Nomor : 700-1-2-7/Ev-LKJ/16  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Internal pada  
Kapanewon Ponjong Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul  
di  
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2. Latar Belakang Evaluasi**

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### **3. Tujuan Evaluasi**

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### 5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja

Predikat	Interpretasi
	baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Ponjong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Kapanewon Ponjong diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Kapanewon Ponjong mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring nomor 700.1.2.7/SKIP/42 tanggal 17 Juli 2024, Kapanewon Ponjong telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Kapanewon Ponjong menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,37** dengan predikat **A**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	24,40
2. Pengukuran Kinerja	30	23,16	24,20
3. Pelaporan Kinerja	15	12,78	11,67
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>81,05</b>	<b>81,37</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>	<b>A</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## **1. Perencanaan Kinerja**

Kapanewon Ponjong telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

## **2. Pengukuran Kinerja**

Kapanewon Ponjong telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

## **3. Pelaporan Kinerja**

Kapanewon Ponjong telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaporan kinerja belum menyajikan seluruh informasi yang mendukung pencapaian kinerja (Perjanjian kinerja yang dilampirkan baru Perjanjian Kinerja Panewu);
- b. Dokumen telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tetapi terdapat ketidakkonsistenan pengungkapan antara target, sasaran dan realisasi pada penyajian tabel yang berbeda;
- c. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;

- d. Informasi dalam pelaporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

### **C. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Panewu Ponjong Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

#### **1. Perencanaan Kinerja**

Tidak terdapat rekomendasi.

#### **2. Pengukuran Kinerja**

Agar hasil pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian aktivitas yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja.

#### **3. Pelaporan Kinerja**

- a. Agar menyajikan informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja di masa yang akan datang.
- b. Agar pada penyusunan laporan di periode yang akan datang lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi.
- c. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja, serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi laporan kinerja.
- d. Agar Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam mengevaluasi pencapaian target sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja secara lebih optimal serta sebagai acuan dalam monev berkala berikutnya.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Tidak terdapat rekomendasi.

## D. PENUTUP

### 1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

### 2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,   
  
Santoyo, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Panewu Ponjong Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman: [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

---

Wonosari, 7 Juli 2025

Nomor : 700-1-2-7 / TL - AKIP / 118  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak  
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi  
(LHE) AKIP Internal Tahun 2024  
pada Kapanewon Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul

Yth. Bupati Gunungkidul  
di  
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Panewu Ponjong.

Lampiran Surat Inspektur Daerah  
 Nomor: 7001.2.7/TL-AP/118  
 Tanggal: 7 Juli 2025

**HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024  
 PADA KAPANEWON PONJONG**

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>					
1.	a. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-
<b>PENGUKURAN KINERJA</b>					
2.	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Agar hasil pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian aktivitas yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja	Bukti hasil pengukuran kinerja digunakan dalam penyesuaian aktivitas yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja (Rencana Aksi, Laporan Monev Triwulanan, Laporan Pengendalian dan/atau bukti lainnya yang mendukung)	a. Surat Pernyataan Kesanggupan Panewu untuk menggunakan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian aktivitas yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja b. Laporan Monev Triwulan I, dan Laporan Pengendalian Bulan Januari s.d. Mei 2025	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
<b>PELAPORAN KINERJA</b>					
3.	<p>a. Pelaporan kinerja belum menyajikan seluruh informasi yang mendukung pencapaian kinerja (Perjanjian kinerja yang dilampirkan baru Perjanjian Kinerja Panewu);</p> <p>b. Dokumen telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tetapi terdapat ketidakkonsistenan pengungkapan antara target, sasaran dan realisasi pada penyajian tabel yang berbeda;</p> <p>c. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan</p> <p>d. Informasi dalam pelaporan kinerja berkala belum digunakan dalam</p>	<p>a. Agar menyajikan informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja di masa yang akan datang;</p> <p>b. Agar pada penyusunan laporan di periode yang akan datang lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi;</p> <p>c. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja, serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi laporan kinerja; dan</p> <p>d. Agar Informasi dalam laporan kinerja berkala</p>	<p>a. Laporan Kinerja yang menyajikan informasi, data dukung yang lengkap, dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi;</p> <p>b. Bukti internalisasi pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai dan penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja, serta keterlibatan seluruh pegawai dalam penyajian informasi pada laporan kinerja (Undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi);</p> <p>c. Bukti informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam mengevaluasi pencapaian target sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p>	<p>a. Surat Pernyataan Kesanggupan Panewu untuk menyajikan informasi dan data dukung yang lengkap serta lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi pada pelaporan kinerja di masa yang akan datang.</p> <p>b. Surat Pernyataan Kesanggupan Panewu untuk menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja, serta melibatkan seluruh pegawai dalam</p>	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
	penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	digunakan dalam mengevaluasi pencapaian target sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja secara lebih optimal serta sebagai acuan dalam monev berkala berikutnya	secara lebih optimal serta sebagai acuan dalam monev berkala berikutnya (Rencana Aksi yang telah disesuaikan dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	penyajian informasi pada laporan kinerja; c. Surat Kesanggupan Panewu untuk menggunakan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam mengevaluasi pencapaian target sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja secara lebih optimal serta sebagai acuan dalam monev berkala berikutnya	
<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>					
4.	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-


  
 Inspektur  
 Septoyo, S.Sos, M.Si  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 197103251991011001

**TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PADA LHE AKIP INTERNAL PADA  
KAPANEWON PONJONG TAHUN 2024**

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak ada rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Agar hasil pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian aktivitas yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Rencana Aksi Perubahan, Laporan Monev Triwulanan, dan Laporan Pengendalian
3	Pelaporan Kinerja	<p>1. Pelaporan kinerja belum menyajikan seluruh Informasi yang mendukung pencapaian kinerja (Perjanjian kinerja yang dilampirkan baru Perjanjian Kinerja Panewu),</p> <p>2. Dokumen telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tetapi terdapat ketidakkonsistenan pengungkapan antara target, sasaran dan realisasi pada penyajian tabel yang berbeda;</p> <p>3. Penyajian Informasi dalam Laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan</p> <p>4. Informasi dalam pelaporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p>	<p>1. Agar menyajikan Informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja di masa yang akan datang;</p> <p>2. Agar pada penyusunan Laporan di periode yang akan datang lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi;</p> <p>3. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja, serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian Informasi Laporan kinerja; dan</p> <p>4. Agar Informasi dalam Laporan kinerja berkala digunakan dalam mengevaluasi pencapaian target sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja secara lebih optimal</p>	<p>1. Telah ditindaklanjuti dengan penyajian Informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja tahun 2025.;</p> <p>2. Telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan yang menyajikan Informasi dan data dukung yang lengkap dan konsisten.</p> <p>3. Telah ditindaklanjuti dengan rakor rutin dan berkala terkait internalisasi pentingnya kepemilikan kinerja pada seluruh pegawai yang dipimpin oleh Panewu serta koordinasi evaluasi capaian kinerja, perumusan tindak lanjut dan pelaporan kinerja. (Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi terlampir).</p> <p>4. Telah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi rutin membahas evaluasi capaian kinerja, permasalahan, dan rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja serta mengevaluasi Rencana Aksi dan</p>

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
			serta sebagai acuan dalam monev berkala berikutnya.	menyesuaikannya berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-



No	Rencana Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Nama Program, Kegiatan, atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, atau Kegiatan	Target	Tingkat Kinerja (Berkas) Program, Kegiatan dan Kegiatan Pendukung								Perkiraan/Realisasi Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	
						TRIMULAN I		TRIMULAN II		TRIMULAN III		TRIMULAN IV			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Konsolidasi dan Penguatan Struktur Dink BKO	Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Dink BKO dan laporan hasil pelaksanaan perencanaan dokumen struktur Dink BKO	2 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	100.000	2	0 dokumen	880.000	Subbag PK
		Konsolidasi dan Penguatan Sistem Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama BKO	Penyusunan laporan, evaluasi kinerja program kegiatan	Jumlah laporan kinerja (bentuk dan format) struktur BKO dan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan kinerja dan KIRUK (struktur kinerja BKO)	17 laporan	5 laporan	300.000	4 laporan	800.000	4 laporan	400.000	4	4 laporan	800.000	Subbag PK
		Reformasi Kinerja Pengantar Daerah	Penyusunan laporan, evaluasi kinerja program kegiatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja pengantar daerah	4 dokumen	0 laporan	-	1 laporan	300.000	0 laporan	1.200.000	1	4 laporan	300.000	Subbag URM
		Aktivitas Kegiatan Pengantar Daerah	Penyusunan dan evaluasi kegiatan pengantar daerah	Jumlah administrasi kegiatan pengantar daerah	0,30 miliar	2,45	41.200.000	2,45	400.000.000	2,85	70000	1,80	10000	103.200.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	190 orang/orang	90	100.000.000	90	100.000.000	12	100.000.000	40	100.000.000	100.000.000	Subbag PK
		Konsolidasi dan Penguatan Laporan Keuangan Akut Tahun BKO	Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun BKO dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Akut Tahun BKO	Jumlah laporan keuangan akut tahun BKO dan laporan hasil realisasi pelaksanaan laporan keuangan akut tahun BKO	1 dokumen	1 laporan	700.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0	1 laporan	-	Subbag PK
		Konsolidasi dan Penguatan Laporan Keuangan Belanja/Perencanaan/Operasional BKO	Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Perencanaan/Operasional BKO dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Belanja/Perencanaan/Operasional BKO	Jumlah laporan keuangan Belanja/Perencanaan/Operasional BKO dan laporan hasil realisasi pelaksanaan laporan keuangan Belanja/Perencanaan/Operasional BKO	10 laporan	3 laporan	4.000.000	4 laporan	7.000.000	0 laporan	8.000.000	3	10 laporan	10.000.000	Subbag PK
		Aktivitas Kegiatan Pengantar Daerah	Penyusunan dan evaluasi kegiatan pengantar daerah	Jumlah administrasi kegiatan pengantar daerah	0,30 miliar	0 dokumen	2.000.000	0 dokumen	0.000.000	0 dokumen	0.000.000	0	0 dokumen	2.000.000	
		Penyediaan dan Pengisian Administrasi Pengantar	Penyusunan dan evaluasi administrasi pengantar	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengisian administrasi pengantar	4 dokumen	0 dokumen	2.000.000	0 dokumen	0.000.000	0 dokumen	0.000.000	0	0 dokumen	2.000.000	Subbag URM
		Aktivitas Kegiatan Pengantar Daerah	Penyusunan dan evaluasi kegiatan pengantar daerah	Jumlah administrasi kegiatan pengantar daerah	10,40 miliar	10,40	30.000.000	11,20	100.000.000	10,20	100.000.000	0,30	100.000.000	32.000.000	
		Penyediaan Kegiatan Belanja (Gaji/Tunjangan Pengantar Daerah yang Dibebankan)	Penyediaan kegiatan belanja (gaji/tunjangan pengantar daerah yang dibebankan)	Jumlah gaji/tunjangan belanja yang dibebankan	4 miliar	1 miliar	100.000	1 miliar	200.000	0 miliar	700.000	1 miliar	1 miliar	700.000	Subbag URM
		Penyediaan Fasilitas dan Pengalangan Kantor	Penyediaan fasilitas dan pengalangan kantor yang dibebankan	Jumlah gaji/tunjangan fasilitas yang dibebankan	3 miliar	5 miliar	41.170.000	1 miliar	100.000	2.071.000	2 miliar	100.000	1 miliar	400.000	Subbag URM
		Penyediaan Fasilitas Kantor	Penyediaan fasilitas kantor yang dibebankan	Jumlah gaji/tunjangan fasilitas yang dibebankan	0 miliar	0 miliar	000.000	0 miliar	1.100.000	4 miliar	400.000	0 miliar	1 miliar	1.100.000	Subbag URM
		Penyediaan Ruang Kantor dan Pengalangan	Penyediaan ruang kantor dan pengalangan yang dibebankan	Jumlah gaji/tunjangan ruang kantor yang dibebankan	10 miliar	0 miliar	1.000.000	0 miliar	200.000	0 miliar	300.000	0 miliar	0 miliar	400.000	Subbag URM
		Fasilitas Kegiatan Kerja	Penyediaan fasilitas kegiatan kerja	Jumlah fasilitas kegiatan kerja	10 miliar	0 miliar	100.000	0 miliar	100.000	0 miliar	100.000	0 miliar	0 miliar	100.000	Subbag URM

No	Kawasan Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Desain Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Target Kinerja Sumner, Program, Kegiatan dan Kegiatan Pendukung								Penanggungjawab Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				
						TRIMESTER I		TRIMESTER II		TRIMESTER III		TRIMESTER IV						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Proy Pengembangan Rupa Bina Gedung dan Fasilitas BGD	Terwujudnya Gedung dan Fasilitas BGD	Jumlah lantai pengembangan rupa bina gedung dan fasilitas BGD	20 lantai	5	800.000	700.000	5	Agres	200.000	2	Agres	810.000	8	Agres	200.000	Subbag Umum
		Pengadaan Jasa Pengembang Layanan Administrasi Daerah	Terlaksananya Pengadaan Jasa Pengembang Layanan Administrasi Daerah	Jumlah laporan pengajuan jasa pengembang layanan administrasi daerah	40 laporan	10	400.000	5.000.000	12	Agres	5.170.000	10	Agres	6.120.000	14	Agres	8.000.000	Subbag Umum
		Pengadaan Jasa Jasa Monev	Terwujudnya Laporan Pertanggung Jawaban dan Monev	Jumlah laporan pertanggung jawaban dan monev	12 laporan	4	4.000	100.000	4	Agres	400.000	2	Agres	400.000	2	Agres	75.000	Subbag Umum
		Pengadaan Jasa Konsultansi Struktur Bangunan dan dan Geoteknik	Terwujudnya Laporan Pertanggung Jawaban Konsultansi Struktur Bangunan dan dan Geoteknik	Jumlah laporan konsultansi jasa konsultansi struktur bangunan dan geoteknik	40 laporan	10	4.000	6.100.000	15	Agres	6.700.000	14	Agres	8.700.000	18	Agres	9.400.000	Subbag Umum
		Pembinaan Kinerja MAB Daerah Penyanggah Utama Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Kinerja MAB Daerah Penyanggah Utama Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pembinaan kinerja MAB Daerah Penyanggah Utama Pemerintahan Daerah	32 unit	20	1.000	1.300.000	24	Agres	5.000.000	22	Agres	27.000.000	18	Agres	20.500.000	Subbag Umum
		Pengadaan Jasa Perencanaan Rupa Bina dan Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Kawasan Daya Dukung dan Lingkungan	Terwujudnya Laporan Pertanggung Jawaban Perencanaan Rupa Bina dan Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Kawasan Daya Dukung dan Lingkungan	Jumlah laporan perencanaan rupa bina dan lingkungan yang diinformasikan dan ditetapkannya pada dan perencanaannya	80 unit	15	1.000	10.000.000	14	Agres	6.300.000	14	Agres	10.200.000	15	Agres	9.200.000	Subbag Umum
		Penelitian Sosial	Terwujudnya Penelitian Sosial	Jumlah penelitian sosial yang dipublikasi	10 unit	10	2.000	300.000	8	Agres	1.000.000	8	Agres	1.000.000	8	Agres	1.000.000	Subbag Umum
		Pembinaan Perilaku dan Moral Lainnya	Operasionalisasi Produk dan Moral Lainnya yang Diinformasikan	Jumlah peraturan dan norma yang diinformasikan	20 unit	8	2.000	1.200.000	8	Agres	1.000.000	7	Agres	1.000.000	9	Agres	1.000.000	Subbag Umum
		Dasar Hukum (Peraturan Daerah) Gedung, Kantor dan Kompleks Kantor	Terwujudnya Gedung, Kantor dan Kompleks Kantor yang Diinformasikan	Jumlah gedung, kantor dan kompleks kantor yang diinformasikan/ditandatangani	1 unit	0	200	25.000.000	1	Agres	25.000.000	0	Agres	25.000.000	0	Agres	25.000.000	Subbag Umum
		Terwujudnya (Peraturan Daerah) Kantor dan Kompleks Gedung, Kantor dan Kompleks Kantor	Terwujudnya Kantor dan Kompleks Gedung, Kantor dan Kompleks Kantor yang Diinformasikan	Jumlah kantor dan kompleks gedung kantor yang diinformasikan/ditandatangani	2 unit	2	100	9.070.000	1	Agres	5.400.000	0	Agres	9.120.000	0	Agres	9.400.000	Subbag Umum
	<b>Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mengingkat</b>			<b>Indeks Pelayanan Kepanawon</b>	<b>91,8</b>			<b>50.000.000</b>			<b>21.000.000</b>			<b>16.000.000</b>			<b>21.000.000</b>	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelesaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	20	Persen	5.000.000	20	Persen	7.000.000	20	Persen	8.700.000	24	Persen	10.200.000	
		Keefektifan Penyelenggaraan Kegiatan dan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan dan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 laporan	0	Agres	0	0	Agres	0	0	Agres	840.000	4	Agres	6.120.000	
		Keefektifan Penyelenggaraan Kegiatan dan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang diinformasikan dan ditetapkannya	1 laporan	0	100.000	0	0	Agres	0	0	Agres	0	0	Agres	6.120.000	Layanan Sosial





No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Momen Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan	Target	Target Kinerja Basahat, Program, Kegiatan dan Kegiatan Pendukung								Penanggungjawab Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan							
						TRIMULAN I		TRIMULAN II		TRIMULAN III		TRIMULAN IV									
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
7	8	9	10	11	12	13	14	15													
		Fasilitas Pengembangan Kehumasan dan Kesehatan Siswa	Tersedianya Sarana Fasilitas dan upaya Pengembangan Kehumasan dan Kesehatan Siswa	Jumlah Sarana Fasilitas dan upaya Pengembangan Kehumasan dan Kesehatan Siswa	3 Sarana	C	100.000		D	100.000		E	100.000	1.000.000	F	100.000		G	100.000	1.000.000	Jawatan Paga



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PENGCAPAN INDIKATOR KINERJA  
KAPURBAYUN PONDOK  
TAHUN 2025**

No	Sebaran Strategi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Materi Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Target Kinerja Nasional, Program, Kegiatan dan Kegiatan/Indikator								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
						TRIMESTER I		TRIMESTER II		TRIMESTER III		TRIMESTER IV					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat			<b>Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan</b>	4 potensi budaya		8.415.000		2.274.000		5.141.000		1.096.000				
		<b>PROGRAM PESTELANGKAHAN KEBUDAYAAN TOGTAMARTA OBORAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Tergelarnya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tergelarnya Oboran Kebudayaan</b>	<b>Pemastian penyelenggaraan penyelenggaraan Tergelarnya oboran kebudayaan</b>	100 Persen	0	Peserta		0	Peserta	100	Peserta	20.000.000	0	Peserta		
		Adat Suku Dayak dan Lembata Dayak	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Adat Suku Dayak dan Lembata Dayak	1 kegiatan	0	Warga		0	Warga	1	Warga	10.000.000	0	Warga		
		Adat Suku Dayak	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Adat Suku Dayak	1 kegiatan	0	Warga		0	Warga	1	Warga	10.000.000	0	Warga		
		<b>PROGRAM PESTELANGKAHAN KEBUDAYAAN TOGTAMARTA OBORAN KEBUDAYAAN DAYAK MATALANBARAN</b>	<b>Tergelarnya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tergelarnya Oboran Kebudayaan</b>	<b>Pemastian penyelenggaraan penyelenggaraan Tergelarnya oboran kebudayaan</b>	100 Persen	22	Peserta	7.320.000	0	Peserta	8.880.000	24	Peserta	12.000.000	24	Peserta	5.650.000
		Adat Suku Dayak dan Lembata Dayak	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Adat Suku Dayak dan Lembata Dayak	2 kegiatan	1	Warga	7.320.000	0	Warga	8.880.000	1	Warga	12.000.000	1	Warga	1.000.000
Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	1 kegiatan	1	Warga	7.320.000	0	Warga	8.880.000	1	Warga	12.000.000	1	Warga	5.650.000		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD			<b>Nilai AKIP PD</b>	81,79 (A)		94.493.371		370.098.776		274.022.474		128.288.014				
	<b>PROGRAM PERLUANG RUMAH PERUMAHAN BARUK KABUPATEN / SOTA</b>	<b>Tergelarnya Kegiatan Penyelenggaraan</b>	<b>Pemastian Pemastian Penyelenggaraan</b>	100 Persen	28	Peserta	280.108.372	28	Peserta	370.098.776	23	Peserta	274.022.474	23	Peserta	128.288.014	
	Pemilihan Anggaran dan Subsidy Energi Desa	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Buku perencanaan, anggaran, dan subside energi per rumah desa	0,275 rumah	0,27	Warga	11.540.000	0,27	Warga	1.320.000	1,20	Warga	10.000.000	1,20	Warga	11.250.000	
	Pemilihan Anggaran dan Subsidy Energi Desa	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Buku perencanaan, anggaran, dan subside energi per rumah desa	1,275 rumah	1,27	Warga	5.130.000	1,27	Warga	1.740.000	1,20	Warga	1.500.000	1,20	Warga	1.740.000	
	Pemilihan Anggaran dan Subsidy Energi Desa	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Buku perencanaan, anggaran, dan subside energi per rumah desa	1,275 rumah	1,27	Warga	5.130.000	1,27	Warga	1.740.000	1,20	Warga	1.500.000	1,20	Warga	1.740.000	
	Pemilihan Anggaran dan Subsidy Energi Desa	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Buku perencanaan, anggaran, dan subside energi per rumah desa	1,275 rumah	1,27	Warga	5.130.000	1,27	Warga	1.740.000	1,20	Warga	1.500.000	1,20	Warga	1.740.000	
	Pemilihan Anggaran dan Subsidy Energi Desa	Pada tanggal 10 Mei 2025 Diadakan kegiatan budaya	Buku perencanaan, anggaran, dan subside energi per rumah desa	1,275 rumah	1,27	Warga	5.130.000	1,27	Warga	1.740.000	1,20	Warga	1.500.000	1,20	Warga	1.740.000	









No.	Nama	Kategori	Materi	Waktu	Tahap								Kategori	
					TRIMESTER I		TRIMESTER II		TRIMESTER III		TRIMESTER IV			
					Ulangan	Ujian	Ulangan	Ujian	Ulangan	Ujian	Ulangan	Ujian		



**LAPORAN SERAPAN BELANJA  
KAPANEWON PONJONG  
BULAN: NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	BULAN	BESAR ANGGARAN BELANJA (Rp.)					REALISASI BELANJA OPERASI		REALISASI BELANJA MODAL		REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA		REALISASI BELANJA TRANSFER		TOTAL	
		Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	TOTAL	Akumulasi (Rp.)	(%)	Akumulasi (Rp.)	(%)	Akumulasi (Rp.)	(%)	Akumulasi (Rp.)	(%)	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 =3+4+5+6	8	9 =8/3*100	10	11 =10/4*100	12	13 =12/5*100	14	15 =14/8*100	16 =8+10+12+14	17 =16/7*100
1	Januari	1.751.605.964,00	45.050.000,00	-	-	1.796.655.964,00	104.210.924,00	5,85	6.426.440,00	14,27	-	-	-	-	110.637.364,00	6,16
2	Februari	1.751.605.964,00	45.050.000,00	-	-	1.796.655.964,00	112.517.050,00	6,43	-	-	-	-	-	-	112.517.050,00	6,26
3	Maret	1.751.605.964,00	45.050.000,00	-	-	1.796.655.964,00	183.581.134,00	11,05	43.639.190,00	96,87	-	-	-	-	227.220.314,00	13,20
4	April	1.706.491.296,00	45.050.000,00	-	-	1.751.541.296,00	89.236.412,00	5,23	-	-	-	-	-	-	89.236.412,00	5,09
5	Mei	1.706.491.296,00	45.050.000,00	-	-	1.751.541.296,00	99.423.832,00	5,83	-	-	-	-	-	-	99.423.832,00	5,68
6	Juni	1.706.491.296,00	45.050.000,00	-	-	1.751.541.296,00	188.586.652,00	11,05	-	-	-	-	-	-	188.586.652,00	10,77
7	Juli	1.706.491.296,00	45.050.000,00	-	-	1.751.541.296,00	128.596.208,00	7,54	-	-	-	-	-	-	128.596.208,00	7,34
8	Agustus	1.706.491.296,00	45.050.000,00	-	-	1.751.541.296,00	208.411.170,00	11,92	-	-	-	-	-	-	208.411.170,00	11,61
9	September	1.654.288.696,00	45.050.000,00	-	-	1.699.338.696,00	155.635.647,00	8,42	-	-	-	-	-	-	155.635.647,00	9,17
10	Oktober	1.654.288.696,00	45.050.000,00	-	-	1.699.338.696,00	95.639.252,00	5,78	-	-	-	-	-	-	95.639.252,00	5,63
11	November	1.651.510.156,20	48.050.000,00	-	-	1.699.560.156,20	109.236.408,00	6,00	-	-	-	-	-	-	109.236.408,00	6,43
12	Desember															
<b>JUMLAH</b>						<b>1.480.274.675,00</b>			<b>43.639.190,00</b>						<b>1.530.340.309,00</b>	



Desember 2025

As. Irwahyuni, S. STP, M.Si  
Ponjoda, Tk. I, IV/b  
NIP. 19800115 199810 2 001

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
BULAN: NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025**

PD KAPANEWON PONJONG  
No DPPA DPPANA.5/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot Kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4 =(3(A)) x100%	5	6 =(5/3)x10 0%	7	8 =(7/3)x10 0%	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAN KEISTIMEWAAN YK URUSN KEBUDAYAAN	30.000.000	1,77	30.000.000	100,00	29.999.856	100,00	144			1,77	1,77	
2 22 08 5.07	Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	1,77	30.000.000	100,00	29.999.856	100,00	144			1,77	1,77	Kap. Ponjong
2 22 08 5.07 0006	Gelar Budaya Yogya	30.000.000	1,77	30.000.000	100,00	29.999.856	100,00	144	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	1 Laporan	1,77	1,77	
4 01 04	PROGRAM PENYELENGGARAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.690.000	2,10	35.690.000	100,00	35.629.355	99,83	60.645			2,10	2,10	
4 01 04 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	35.690.000	2,10	35.690.000	100,00	35.629.355	99,83	60.645			2,10	2,10	Kap. Ponjong
4 01 04 5.01 0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	35.690.000	2,10	35.690.000	100,00	35.629.355	99,83	60.645	Jumlah Program dan Kegiatan yang Disusun	3 Dokumen	2,10	2,10	

7	01	01		PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	1.374.410.256	80,84	1.347.998.796	82,19	1.218.208.092	88,63	155.202.164			79,57	78,05	
	01	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	37.635.000	2	31.445.000	82,19	31.330.000	83,25	6.305.000			1,85	1,85	Kap. Ponjong
	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.285.000	1,90	26.535.000	82,19	26.420.000	81,83	5.855.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,56	1,56	
	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA. SKPD	450.000	0,03	450.000	100,00	450.000	100,00	-	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,03	0,03	
	01	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA. SKPD	600.000	0,04	600.000	100,00	600.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,04	0,04	
	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA. SKPD	2.170.000	0,13	1.920.000	88,48	1.920.000	88,48	250.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,11	0,11	
	01	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA. SKPD	660.000	0,04	660.000	100,00	660.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	0,04	0,04	
	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	680.000	0,04	680.000	100,00	680.000	100,00	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	0,04	0,04	
	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	790.000	0,05	600.000	75,95	600.000	75,95	190.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,04	0,04	

01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.071.766.956	63,06	1.063.245.496	99,79	992.604.052	92,61	79.162.904			62,56	62,56	Kap. Ponjong	
01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.035.756.956,20	60,94	1.033.575.496	99,79	963.134.552	92,99	72.622.404	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan	60,81	60,81		
01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	1.730.000	0,10	1.730.000	100,00	1.730.000	100,00	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,10	0,10		
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.280.000	2,02	27.940.000	81,51	27.739.500	80,92	6.540.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem	13 Laporan	1,64	1,64	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.506.900	0,50	7.894.400	92,80	5.361.186	63,02	3.145.714			0,46	0,46	Kap. Ponjong
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6.506.900	0,50	7.894.400	92,80	5.361.186	63,02	3.145.714	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6 dokumen	0,46	0,46	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	66.331.000	3,90	65.607.000	98,91	61.135.936	92,17	5.195.064			3,86	3,86	Kap. Ponjong
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	3.225.000	0,19	3.225.000	100,00	3.225.000	100,00	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,19	0,19	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.760.000	3,28	55.760.000	100,00	51.348.936	92,09	4.411.064	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	3,28	3,28	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.539.000	0,21	2.995.000	84,63	2.995.000	84,63	544.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	0,18	0,18	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Peralatan Barang Cetak dan Penggandaan	2.807.000	0,17	2.627.000	93,59	2.567.000	91,45	240.000	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	0,15	0,15	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.000	0,04	600.000	100,00	600.000	100,00	-	Jumlah tamu yang difasilitasi	4 paket	0,04	0,04	

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000	0,02	400.000	100,00	400.000	100,00	-	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	0,02	0,02	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	36.018.000	2,12	32.382.000	89,91	31.448.918	87,31	4.569.082			1,91	1,91	Kap. Ponjong
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	0,02	350.000	100,00	350.000	100,00	-	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	0,02	0,02	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	35.668.000	2,10	32.032.000	89,81	31.098.918	87,19	4.569.082	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	1,88	1,88	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.152.400	9,04	147.424.900	95,64	96.328.000	62,49	57.824.400			8,93	7,42	Kap. Ponjong
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	40.300.000	2,37	38.600.000	95,78	38.192.000	94,77	2.108.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	64 Unit	2,27	2,27	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	500.000	0,29	500.000	100,00	500.000	100,00	-	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	0,29	0,29	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	5.400.000	0,32	5.100.000	94,44	5.100.000	94,44	300.000	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	0,30	0,30	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	77.764.900	4,58	77.764.900	100,00	27.076.000	34,82	50.688.900	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	4,58	3,07	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.187.500	1,78	25.460.000	84,34	25.460.000	84,34	4.727.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	1,50	1,50	

7	01	02			PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.310.000	2,20	31.450.000	84,29	31.340.000	84,00	5.970.000	-	-	-	1,85	1,85	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.270.000	0,25	4.270.000	100,00	4.270.000	100,00	-				0,25	0,25	Kap. Ponjong
7	01	02	2.01	0001	Koord./Sinergi Perencanaan dan Pelaks. Keg. Pemerintahan dgn PD dan Instansi Vertikal	4.270.000	0,25	4.270.000	100,00	4.270.000	100,00	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan		0,25	0,25	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yg tdk dilaksa. Oleh Unit kerja PD yg ada di Kecamatan	33.040.000	1,94	27.180.000	82,26	27.070.000	81,93	5.970.000				1,60	1,60	Kap. Ponjong
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kpd Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.040.000	1,94	27.180.000	82,26	27.070.000	81,93	5.970.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		1,60	1,60	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	35.985.000	2,12	35.985.000	100,00	35.915.000	99,81	70.000				2,12	2,12	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.865.000	1,58	26.865.000	100,00	26.795.000	99,74	70.000				1,58	1,58	Kap. Ponjong
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja	18.555.000	1,09	18.555.000	100,00	18.555.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja	2 Dokumen		1,09	1,09	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.310.000	0,49	8.310.000	100,00	8.240.000	99,16	70.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan		0,49	0,49	

7	01	03	2.03		Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Lembaga Tingkat	9.120.000	0,54	9.120.000	100,00	9.120.000	100,00	-			0,54	0,54	Kap. Ponjong	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat		7.030.000	0,41	7.030.000	100,00	7.030.000	100,00	-	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	0,41	0,41		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2.090.000	0,12	2.090.000	100,00	2.090.000	100,00	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	0,12	0,12		
7	01	04			PROG. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KOORDINASI	17.745.000	1,04	17.745.000	100,00	17.745.000	100,00	-			1,04	1,04		
7	01	04	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Upaya Ketertiban Umum	17.745.000	1,04	17.745.000	100,00	17.745.000	100,00	-			1,04	1,04	Kap. Ponjong	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan		7.000.000	0,41	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,41	0,41		
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		10.745.000	0,63	10.745.000	100,00	10.745.000	100,00	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	0,63	0,63		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		104.479.900	6,15	104.479.900	100,00	98.083.503	93,88	6.396.397				6,15	6,15	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum	104.479.900	6,15	104.479.900	100,00	98.083.503	93,88	6.396.397				6,15	6,15	Kap. Ponjong

7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional di dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Peleaks. UUD NKRI Thn 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100.204.900	5,90	100.204.900	100,00	93.608.503	93,62	6.396.397	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	5,90	5,90	
7	01	05	2.01	0006	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.275.000	0,25	4.275.000	100,00	4.275.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	5 Dokumen	0,25	0,25	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>63.940.000</b>	<b>3,76</b>	<b>63.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>63.419.503</b>	<b>99,19</b>	<b>520.497</b>			<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	
7	01	06	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.940.000	3,76	63.940.000	100,00	63.419.503	99,19	520.497	-		3,76	3,76	Kap. Ponjong
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.400.000	0,08	1.400.000	100,00	1.330.000	95,00	70.000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	24 Dokumen	0,08	0,08	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keudes dan Pendayagunaan Aset Desa	5.710.000	0,34	5.710.000	100,00	5.710.000	100,00	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	0,34	0,34	
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	960.000	0,06	960.000	100,00	960.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,06	0,06	

7	01	06	2.01	0011	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	450.000	0,03	450.000	100,00	450.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tgas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0,03	0,03
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	53.650.000	3,18	53.650.000	100,00	53.199.503	99,16	450.497	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	3,18	3,16
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.750.000	0,10	1.750.000	100,00	1.750.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	2 Dokumen	0,10	0,10
<b>JUMLAH</b>						<b>1.699.560.156,20</b>	<b>100,0</b>	<b>1.667.288.696,00</b>	<b>98,10</b>	<b>1.530.340.309,00</b>	<b>90,04</b>	<b>169.219.847,20</b>			<b>98,36</b>	<b>96,84</b>


 Desember 2025  
 John Triwahyuni, S. STP.M.Si  
 Pembina TK. I, IV/b  
 NIP. 09800115 199810 2 001

LAPORAN KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT  
BULAN: NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

PD : KAPANEWON PONJONG  
No DPA : DPPAJA.6/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024

NO	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik				Kendala	Tindak lanjut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
						Target		Realisasi				
						Narasi	%	Narasi	%			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA							
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (pencetakan, jasa perencanaan utk atap gedung dan pemeliharaan atap gedung)	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (pencetakan, jasa perencanaan utk atap gedung)	67%	1. Adanya pergantian PA ditengah proses pembuatan dokumen kontrak. 2. Cuaca yang kurang mendukung karena memasuki musim penghujan  3. Adanya beberapa kegiatan yang sudah terjadwal menggunakan aula.	1. segera menyelesaikan dokumen yang diperlukan  2. Koordinasi dengan penyedia untuk menyesuaikan jadwal pengerjaan.  3. Koordinasi dengan penyedia dan penyelenggara acara untuk penyesuaian waktu dan pekerjaan.	1. BPBJ Kab. Gunungkidul 2. Pengguna Anggaran lama 3. Pihak penyedia/kontraktor





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦗꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦁ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id; Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id

Ponjong, 2 Desember 2025

Nomor : 900.1.17/46/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rakoor capaian kinerja

Yth. Karyawan- Karyawati  
Kapanewon Ponjong  
di  
Ponjong

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu untuk rapat koordinasi di Kapanewon yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 03 Desember 2025  
Pukul : 07.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Kapanewon  
Acara : 1. Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Kapanewon dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan TA 2025.  
2. Koordinasi pembahasan rencana tindak lanjut hasil evaluasi (optimalisasi pencapaian target kinerja).

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Panewu Ponjong,



Asih Tri Wahyuni, SSTP, M.Si  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 198001151998102001

Kapanewon Ponjong tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul

Hoffine SIGRAK 082324675656  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT  
ACARA

: Rabu, 3 Desember 2025  
: 09-30 WIB  
: RR Kaparewon Pongong  
: Rakor evaluasi capaian kinerja kap dan persiapan penyusunan LK 1 TA 2025

No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ash Triwahyuni	Kap Pong	1
2	Agus Sismanto	Kap. Pongong	2
3	Suyarna	Kaparewon	3
4	Eti Kusumawati	Kaparewon Pongong	4
5	Ruhyaqi	Kap-pongong	5
6	MUKTAR HASSAN	Kap Pongong	6
7	Pujyanita	Kap. Pongong	7
8	Partauman	Kap. Pongong	8
9	Subarokhami	Kap. Pongong	9
10	Marsukoh	Kap. Pongong	10
11	Mufono	Kap - Pongong	11
12	Octavia Rahma	Kap Pongong	12
13	Dwi Purwati	kap Pongong	13
14	Nuning Ferdianti	Kap Pongong	14
15	Andree Anung	Kap Pongong	15

Pongong, 2-12-2025  
Petugas

*Marsukoh*  
Marsukoh, S.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Sumber Kidul Ponjong Gunungkidul 55892 Telepon (0274) 3950002  
Posel ponjong@gunungkidulkab.go.id Laman ponjong.gunungkidulkab.go.id

NOTULEN

- Sidang/Rapat : 1. Rapat evaluasi capaian kinerja Kapanewon dan  
Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2025  
2. Koordinasi pembahasan rencana tindak lanjut hasil  
evaluasi (optimalisasi pencapaian target kinerja)
- Hari/Tanggal Rapat : Rabu, 3 Desember 2025
- Waktu Sidang/Rapat : 07.30 WIB
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Panewu  
3. Paparan dan Musyawarah  
4. Kesimpulan  
5. Penutup
- Pimpinan Sidang/Rapat
- Ketua : Panewu
- Sekretaris : Marzukoh, S.M
- Pencatat : Dwi Purwati
- Inti acara : 1. Panewu menekankan perlunya optimalisasi  
pencapaian target kinerja yaitu dengan  
mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi  
permasalahan, dan merencanakan tindak lanjut  
yang diperlukan.  
2. PPTK melakukan pencermatan terhadap capaian  
kinerja Kapanewon bulan November 2025.  
3. Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor  
dan Bangunan Lainnya yang belum dapat  
terrealisasi 100%.  
4. Terdapat sejumlah kendala yang mendasari  
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan  
Bangunan Lainnya belum dapat terealisasi  
sepenuhnya, antara lain: adanya pergantian PA,  
cuaca yang kurang mendukung, dan adanya  
beberapa kegiatan yang sudah terjadwal  
menggunakan aula.  
5. Tindak lanjut yang diperlukan: segera melengkapi  
dokumen yang diperlukan, koordinasi dengan  
penyedia terkait dengan penyesuaian jadwal  
pengerjaan, serta koordinasi dengan penyedia dan  
penyelenggara acara untuk penyesuaian waktu  
serta pekerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

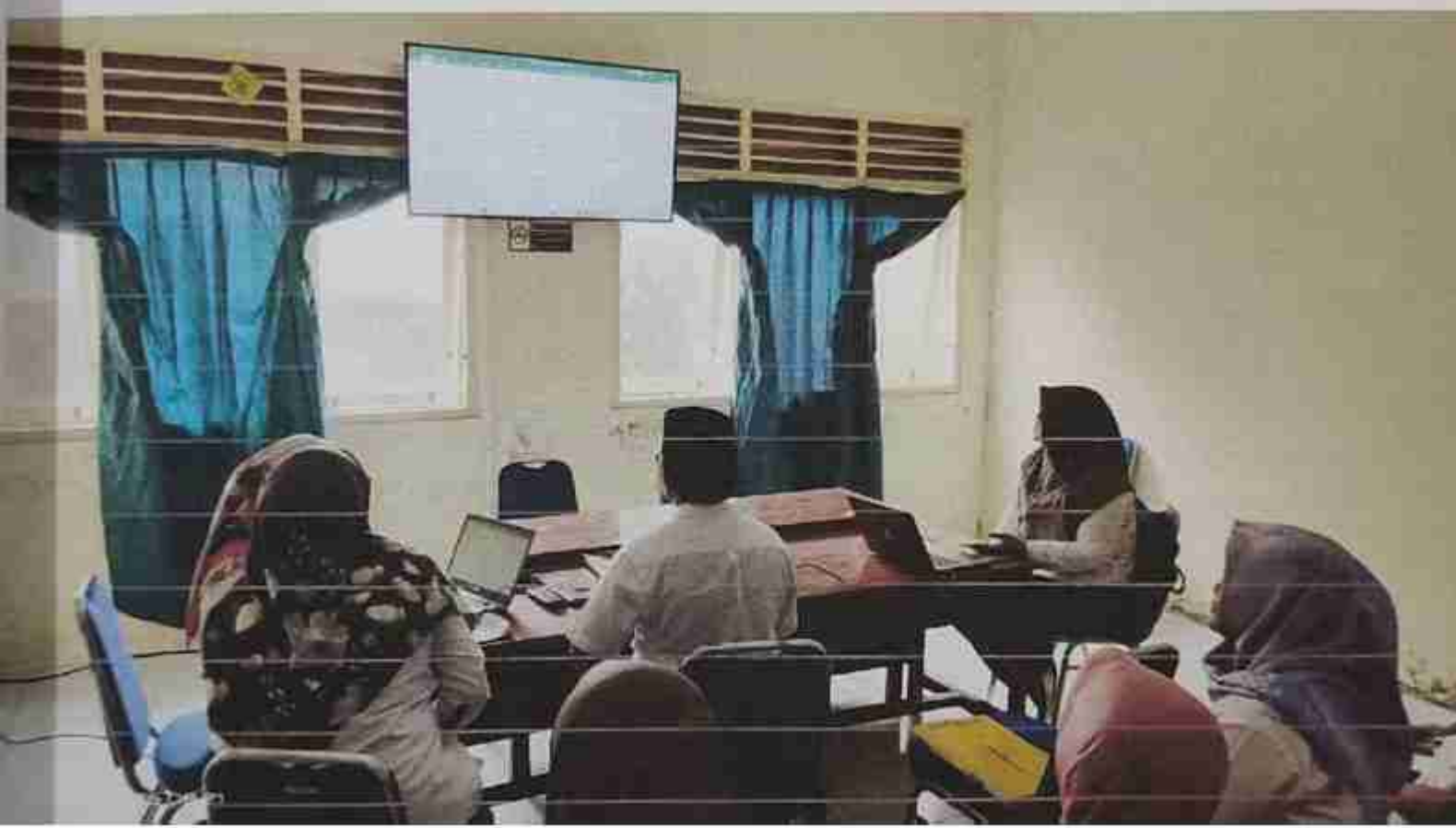
Sumber Kidul Ponjong Ponjong Gunungkidul 55892 Telepon (0274) 3950002  
Posel: ponjong@gunungkidulkab.go.id Laman: ponjong.gunungkidulkab.go.id

---

6. PPTK harus segera menyelesaikan SPJ/administrasi kegiatan yang sudah terlaksana karena akan menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan TA 2025.
7. Adanya kebutuhan penyesuaian penganggaran untuk beberapa sub kegiatan yang diusulkan dalam perubahan pergeseran anggaran, Panewu mengimbau setelah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran terbit, agar dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi.
8. Masing-masing PPTK memastikan seluruh output subkegiatan tercapai dan mendokumentasikannya sebagai bukti kinerja dalam SKP 2025.

Notulis

(Dwi Purwati)





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦗ

Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892  
Telepon (0274) 3950002

[Lamaran.ponjong.gunungkidulkab.go.id](mailto:Lamaran.ponjong.gunungkidulkab.go.id); [Posel.ponjong@gunungkidulkab.go.id](mailto:Posel.ponjong@gunungkidulkab.go.id)

Ponjong, 10 Desember 2025

Nomor : 000.7.2/47/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Karyawan- Karyawati  
Kapanewon Ponjong  
di  
Ponjong

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu untuk rapat koordinasi di Kapanewon yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Desember 2025  
Pukul : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Kapanewon  
Acara : 1. Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPA Kapanewon Ponjong tahun 2026.  
2. Koordinasi progres tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi, monitoring dan reviu Inspektorat Daerah.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Panewu Ponjong,



Asih Tri Wahyuni, SSTP, M.Si  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 198001151998102001

Kapanewon Ponjong tidak menaungi suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

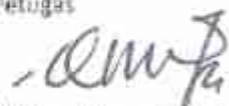
HARI/TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT  
ACARA

: Rabu, 10 Desember 2025  
: 13 - 30 WIB  
: Ruang Rapat Kaptenwon  
: Rapat koordinasi penyusunan DPA Tahun 2026

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muliana S.	Kepa Lemoran	1
2	Asih Triwahyuni	Ka Dgn Pw Dgn	2
3	Eti Sisriwati	Kepala Janda Lemoran	3
4	Subarkhin	Ka Jasos	4
5	Rubiyati	Staf	5
6	Marzukah	Subbag PK	6
7	Gumrah	Staf	7
8	Pujianto	Jepelum	8
9	Suyatno	Jakarta	9
10	Nuning Ferdianti	Staf	10
11	Oletaria Rahawati	THL	11
12	Dwi Purwati	THL	12
13	Partiawan	Subag Lemoran	13
14	Agus Srimanto	Parom	14
15	Anam	THL	15

Panjang, 10 Des. 2025

Petugas

  
MARZUKAH, SM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul Ponjong Gunungkidul 55892 Telepon (0274) 3950002  
Posel: ponjong@gunungkidulkab.go.id Laman: ponjong.gunungkidulkab.go.id

NOTULEN

- Sidang/Rapat : 1. Rapat koordinasi penyusunan DPA Kapanewon Ponjong tahun 2026  
2. Koordinasi progres tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi, monitoring dan reviu Inspektorat Daerah.
- Hari/Tanggal Rapat : Rabu, 10 Desember 2025
- Waktu Sidang/Rapat : 13.30 WIB
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Panewu  
3. Paparan dan Musyawarah  
4. Kesimpulan  
5. Penutup
- Pimpinan Sidang/Rapat
- Ketua : Panewu
- Sekretaris : Marzukoh, S.M
- Pencatat : Dwi Purwati
- Inti acara : 1. Melakukan pencermatan terhadap RKA tahun 2026 di masing2 bagian/jawatan apakah sudah sesuai kebutuhan untuk rincian belanjanya.  
2. RKA tahun 2026 yang dibagikan ke para jawatan, agar segera disusun anggaran kasnya, sesuai jadwal yang telah ditentukan.  
3. Agar setiap jawatan untuk menyusun KAK 2026 yang disesuaikan dengan kegiatan serta anggaran masing-masing jawatan  
4. Menyusun rencana aksi 2026 yang disesuaikan target dan anggarannya.  
5. Target kinerja utama Kapanewon Ponjong tahun 2026 sebesar 97,18.  
6. Panewu mengingatkan untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi atas hasil evaluasi, monitoring dan reviu Inspektorat Daerah terkait dengan SAKIP.  
7. Panewu juga menyampaikan bahwa seluruh pegawai harus mengetahui apa saja yang menjadi target kinerja dan ikut terlibat dalam menyediakan informasi terkait capaian dan kendala pada laporan kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**KAPANEWON PONJONG**

*ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦏꦶꦢꦸꦭ*

Sumber Kidul Ponjong Ponjong Gunungkidul 55892 Telepon (0274) 3950002  
Posel: ponjong@gunungkidulkab.go.id Laman: ponjong.gunungkidulkab.go.id

---

8. Semua jawatan melaporkan capaian dan kendala yang dihadapi tahun 2025 ini serta solusi penyelesaiannya, sebagai bahan untuk pelaksanaan anggaran 2026.
9. Tahun 2026 diharapkan dapat bekerja sama dan bersinergi dengan baik agar semua target dapat tercapai dengan baik.

Notulis

(Dwi Purwati)





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)

Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id,

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/2734/2025

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE  
NIP : 196905311991031003  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi  
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul  
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : PARTIMAN, SIP  
NIP : 19740518200906001  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I, III/b  
Jabatan : PIt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan  
Alamat : Kapanewon Ponjong

yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan III Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021- 2026 Rp 13.606.366.882,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 7.786.936.766,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 1.699.338.696,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 92%
- e. Capaian keuangan RKPD sebesar 78.01% atau Rp 1.325.635.349,00
- f. Capaian kinerja RPJMD 2023 sebesar 83.03%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 66.97% atau Rp 9.112.572.115,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

PARTIMAN, SIP  
Penata Muda Tk.I, III/b  
NIP. 197405182009061001

Dibuat di : Wonosari  
Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE  
Penata Tk.I, III/d  
NIP.196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan  
Kepala Bappeda



MOHAMAD ARIF ALDIAN.S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.197502221993111001







Kode	Sumber Dana/Di Sumber Penerimaan Kategori Sub-Kategori	Kategori Program Kategori Kategori Kategori	Indikator Kinerja Utama Kategori/Dasar Program Kategori Sub-Kategori	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2013 yang diusulkan												Realisasi Kinerja pada Tahunan								Realisasi Kinerja Utama dan Anggaran RPJMD yang diusulkan		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD yang diusulkan (%)		Keterangan	Penyempurnaan Kategori Kategori		
				I		II		III		IV		I		II		III		IV		a	b	c	d								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18						
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		
1.11.02.2.01.01	Fasilitas Kesehatan Sala Parasetektik Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Jumlah Dokter yang Dokter dan Kategori	24 Dokter	1.400.000	0 Dokter	1.400.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1.400.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	24	100%	1.400.000	100%	100%		
1.11.02.2.01.02	Fasilitas Kesehatan Sala Parasetektik Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Jumlah Dokter yang Dokter dan Kategori	1 Dokter	6.710.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	6.710.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	6.710.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1	100%	6.710.000	100%	100%			
1.11.02.2.01.03	Fasilitas Kesehatan Sala Parasetektik Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Jumlah Dokter yang Dokter dan Kategori	11 Dokter	880.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	880.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	880.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	11	100%	880.000	100%	100%			
1.11.02.2.01.04	Fasilitas Kesehatan Sala Parasetektik Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Jumlah Dokter yang Dokter dan Kategori	1 Dokter	400.000	0 Dokter	0	0 Dokter	400.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	400.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1	100%	400.000	100%	100%			
1.11.02.2.01.05	Fasilitas Kesehatan Sala Parasetektik Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Jumlah Dokter yang Dokter dan Kategori	1 Dokter	42.000.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	42.000.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	42.000.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1	100%	42.000.000	100%	100%			
1.11.02.2.01.06	Fasilitas Kesehatan Sala Parasetektik Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Jumlah Dokter yang Dokter dan Kategori	2 Dokter	1.700.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1.700.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1.700.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	2	100%	1.700.000	100%	100%			
2				31.71 Dokter	41.7 juta	0 Dokter	0 juta	0 juta	0 juta	0 juta	41.7 juta	0 Dokter	0 juta	0 juta	0 juta	0 juta	0 juta	0 juta	41.7 juta	0	0 Dokter	0	0 Dokter	31.71	100%	41.7 juta	100%	100%			
3.2.1.1	REKONSTRUKSI PERSARANAN SALURAN SALURAN SALURAN	Saluran Kategori Kategori Kategori	Rekonstruksi saluran Kategori	100 Pekerjaan	1.014.100.700	20 Pekerjaan	601.201.150	20 Pekerjaan	640.363.040	20 Pekerjaan	635.414.320	20 Pekerjaan	605.414.320	20 Pekerjaan	660.555.380	20 Pekerjaan	347.337.000	20 Pekerjaan	280.337.400	0	0 Pekerjaan	0	0 Pekerjaan	100	100%	1.014.100.700	70%	74,8%			
4.10.11.1.01	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	100 Pekerjaan	17.400.000	20 Pekerjaan	1.100.000	20 Pekerjaan	1.100.000	20 Pekerjaan	11.800.000	20 Pekerjaan	10.800.000	20 Pekerjaan	11.340.000	20 Pekerjaan	4.200.000	20 Pekerjaan	3.800.000	0	0 Pekerjaan	0	0 Pekerjaan	100	100%	17.400.000	60%	68,4%			
4.10.11.1.01.01	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	1 Dokter	32.200.000	0 Dokter	2.200.000	0 Dokter	4.750.000	0 Dokter	7.340.000	0 Dokter	10.800.000	0 Dokter	9.800.000	0 Dokter	6.700.000	0 Dokter	7.800.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1	100%	32.200.000	100%	100%			
4.10.11.1.01.02	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	1 Dokter	400.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	400.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	400.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1	100%	400.000	100%	100%			
4.10.11.1.01.03	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	Saluran Kategori Kategori Kategori	Penyediaan dan Distribusi Pelayanan Dasar	1 Dokter	800.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	800.000	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	800.000	0	0 Dokter	0	0 Dokter	0	0 Dokter	1	100%	800.000	100%	100%			

Kode	Sumber Dana/ Sumber Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Sumber Program/ Subprogram/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Sumber Realisasi, Sumber Anggaran Sub Kegiatan	Tipe Kegiatan pada Triwulan												Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Dana-Monev dan Anggaran (RPJ) yang Diakumulasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJ yang Diakumulasi (%)	Kategori	Penyebab Tidak Tercapainya Indikator Kinerja	Batas
				I		II		III		IV		I		II		III		IV															
				a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	16	17				
8.00.01.2.01.04	Kontribusi dan Partisipasi DPA/DPD	Subsidi Kegiatan PAA/DPD	Jumlah Laporan DPA/DPD dan Laporan Hasil Realisasi Partisipasi DPA/DPD	2 Desember	2.100.000	3 Desember	1.800.000	3 Desember	1.300.000	3 Desember	1.100.000	1.200.000	1 Desember	1.000.000	1 Desember	1.200.000	1 Desember	1.100.000	1 Desember	1.000.000	1 Desember	1.200.000	1 Desember	1.100.000	1 Desember	1.000.000	1.000.000	100	99,48	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat			
8.00.01.2.01.05	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Kegiatan Komite dan Komite Pembina Komite DPDC	Subsidi Laporan Kegiatan Komite DPDC dan Komite Pembina Komite DPDC	Jumlah Laporan Kegiatan Komite DPDC dan Laporan Hasil Realisasi Kegiatan Komite DPDC dan Komite Pembina Komite DPDC	17 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	1 Januari	500.000	500.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat				
8.00.01.2.01.07	Subsidi Kinerja Pengabdian Sosial	Subsidi Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	100.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat				
8.00.01.2.01.0800	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial (PA/DPD)	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial (PA/DPD)	Jumlah Laporan Pengabdian Sosial (PA/DPD) dan Laporan Hasil Realisasi Pengabdian Sosial (PA/DPD)	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	1 Desember	800.000	800.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat				
8.00.01.2.02	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	100 Januari	1.271.540.444	100 Januari	920.540.477	100 Januari	520.740.398	100 Januari	470.570.120	100 Januari	412.766.154	100 Januari	358.982.740	100 Januari	308.207.570	100 Januari	257.430.300	100 Januari	207.430.300	100 Januari	157.430.300	100 Januari	107.430.300	100 Januari	57.430.300	57.430.300	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat		
8.00.01.2.02.01	Pengabdian dan Partisipasi Masyarakat	Subsidi Kegiatan Pengabdian dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Laporan yang Berencana dan Laporan yang Realisasi	210 Desember	1.000.000.000	210 Desember	600.000.000	210 Desember	300.000.000	210 Desember	200.000.000	210 Desember	150.000.000	210 Desember	100.000.000	210 Desember	50.000.000	210 Desember	20.000.000	210 Desember	10.000.000	210 Desember	5.000.000	210 Desember	2.500.000	210 Desember	1.250.000	1.250.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat	Terjadi keterlambatan dalam proses pengabdian dan partisipasi masyarakat.	
8.00.01.2.02.02	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Kegiatan Komite dan Komite Pembina Komite DPDC	Subsidi Laporan Kegiatan Komite DPDC dan Komite Pembina Komite DPDC	Jumlah Laporan Kegiatan Komite DPDC dan Laporan Hasil Realisasi Kegiatan Komite DPDC dan Komite Pembina Komite DPDC	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1 Januari	1.700.000	1.700.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat				
8.00.01.2.02.0300	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Kegiatan Komite dan Komite Pembina Komite DPDC	Subsidi Laporan Kegiatan Komite DPDC dan Komite Pembina Komite DPDC	Jumlah Laporan Kegiatan Komite DPDC dan Laporan Hasil Realisasi Kegiatan Komite DPDC dan Komite Pembina Komite DPDC	11 Januari	24.260.000	1 Januari	8.710.000	1 Januari	6.000.000	1 Januari	8.710.000	1 Januari	1.600.000	1 Januari	8.710.000	1 Januari	3.000.000	1 Januari	3.000.000	1 Januari	3.000.000	1 Januari	3.000.000	1 Januari	3.000.000	1 Januari	3.000.000	3.000.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat	Terjadi keterlambatan dalam proses pengabdian dan partisipasi masyarakat.	
8.00.01.2.03	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	100 Januari	6.000.000	100 Januari	3.000.000	100 Januari	1.000.000	100 Januari	7.200.000	100 Januari	4.800.000	100 Januari	1.200.000	100 Januari	1.200.000	100 Januari	1.200.000	100 Januari	1.200.000	100 Januari	1.200.000	100 Januari	1.200.000	100 Januari	1.200.000	1.200.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat		
8.00.01.2.0300	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	3 Desember	8.000.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3 Desember	3.270.000	3.270.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat	Terjadi keterlambatan dalam proses pengabdian dan partisipasi masyarakat.			
8.00.01.2.03.01	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	100 Januari	60.000.000	100 Januari	17.800.000	100 Januari	10.240.000	100 Januari	10.710.000	100 Januari	10.200.000	100 Januari	48.100.000	100 Januari	5.000.000	100 Januari	5.000.000	100 Januari	5.000.000	100 Januari	5.000.000	100 Januari	5.000.000	100 Januari	5.000.000	5.000.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat		
8.00.01.2.03.02	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	1 Januari	400.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	1 Januari	100.000	100.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat		
8.00.01.2.03.0300	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	4 Pebruari	1.200.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	600.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat		
8.00.01.2.03.0400	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	10 Pebruari	10.700.000	10 Pebruari	40.170.000	10 Pebruari	1.800.000	10 Pebruari	3.000.000	10 Pebruari	3.000.000	10 Pebruari	3.000.000	10 Pebruari	44.300.000	10 Pebruari	2.000.000	10 Pebruari	2.000.000	10 Pebruari	2.000.000	10 Pebruari	2.000.000	10 Pebruari	2.000.000	10.200.000	10.200.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat	Terjadi keterlambatan dalam proses pengabdian dan partisipasi masyarakat.
8.00.01.2.03.0500	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	4 Pebruari	1.500.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	1.100.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	1.400.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	4 Pebruari	600.000	600.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat		
8.00.01.2.03.0600	Kontribusi dan Partisipasi Pengabdian Sosial	Subsidi Kegiatan Pengabdian Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial	11 Pebruari	1.600.000	11 Pebruari	1.600.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	11 Pebruari	800.000	800.000	100	100	Keaktifan Masyarakat dan Masyarakat		



Kode	Nama Kegiatan/Program/Kelembagaan	Sasaran/Target	Indikator Kinerja Utama	Tipe Kegiatan								Kategori Kegiatan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (Rp) yang Dibekukan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (Rp) yang Dibekukan (%)	Keterangan	Peningkatan Jumlah Anggaran/Kelembagaan						
				1		2		3		4		5		6		7		8						9		10			
				a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp	a	bp					a	bp	a	bp		
4.21.01.2.01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	100 Lahan	0	24 Januari	0	0	23 Januari	0	0	23 Januari	0	0	10 Januari	7.000.000	23 Januari	0	0	23 Januari	0	0	10 Januari	27.000.000	40	0		Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	
4.21.04.5.01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.21.04.5.01.01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	100 Lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1.000.000.000		800.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		800.000.000		800.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000	80,00	70,00		

  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 KABUPATEN WONOREJO  
 PARTO W. S. S.  
 NIP. 196308011991011001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
  
 PARTO W. S. S.  
 NIP. 196308011991011001

















